



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2023-2026**



**PANGKALPINANG
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan masa jabatan Berakhir Tahun 2022 disebutkan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Dokumen Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh perangkat daerah untuk menyusun Rencana Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

Selain itu pemenuhan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan empat tahunan daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan ke depan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh masyarakat.

Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit Rencana Pembangunan Daerah (RPD), kemudian menterjemahkan secara strategis sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Organisasi Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dilaksanakan melalui proses yang transparan, demokratis, partisipatif. Adapun Alur pemikiran pembuatan Rencana Strategis sebagai tergambar dalam

Gambar

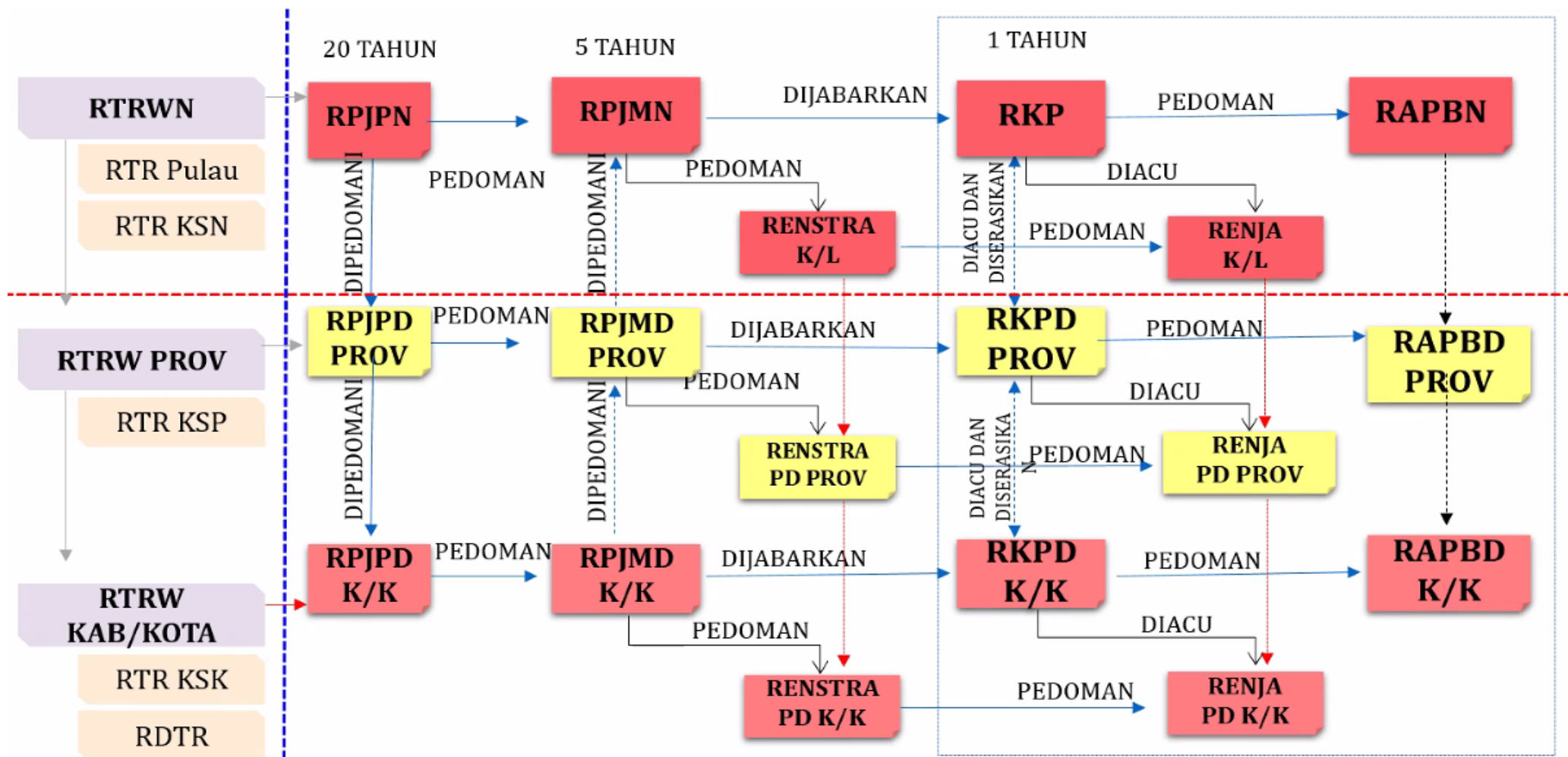
I.1.

Gambar I.1 Alur Pikir Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sekaligus menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar 1.2

Gambar I.2 Keterkaitan antar dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perencanaan Lainnya



I.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

- Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2022 Nomor Seri).

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode empat tahun kedepan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

I.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 ;
- b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2023-2026 ;
- c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah periode Renstra yanglalu.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Menguraikan Secara Singkat Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026

Bab II : Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Berisikan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi; Sumber Daya Yang Dimiliki; Capaian Kinerja Layanan Dan Tantangan Dan Peluang

- Pengembangan Layanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Bab III : Permasalahan Dan Isu - Isu Strategis Perangkat Daerah**
Merupakan Uraian Identifikasi Permasalahan; Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2023-2026; Telaahan Renstra Terhadap Sasaran Jangka Menengah Serta Penentuan Isu – Isu Strategis
- Bab IV : Tujuan Dan Sasaran**
Berisikan Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026
- Bab V : Strategi Dan Kebijakan**
Berisikan Strategi dan Kebijakan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra
- Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
Berisikan program-program prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dan akan dilaksanakan berikut dengan pencapaian target indicator kinerja serta indikasi kebutuhan pendanaan program selama 5(lima) tahun
- Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Pada bagian ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026
- Bab VIII : Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

II.1.1 Tugas dan Fungsi

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang keuangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya. Kepala Badan Keuangan membawahi bidang kerja diantaranya :

- 1 **Sekretariat** dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Badan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Badan Keuangan Daerah mengkoordinasikan bidang-bidang.

- 2 Bidang Perencanaan Anggaran** dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perencanaan Anggaran.
- 3 Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota** dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 4 Bidang Perbendaharaan** dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perbendaharaan.
- 5 Bidang Akuntansi** dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Akuntansi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Akuntansi.
- 6 Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah** dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 7 Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah** dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
- 8 Unit Pelaksana Teknis**
Unit pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.

II.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

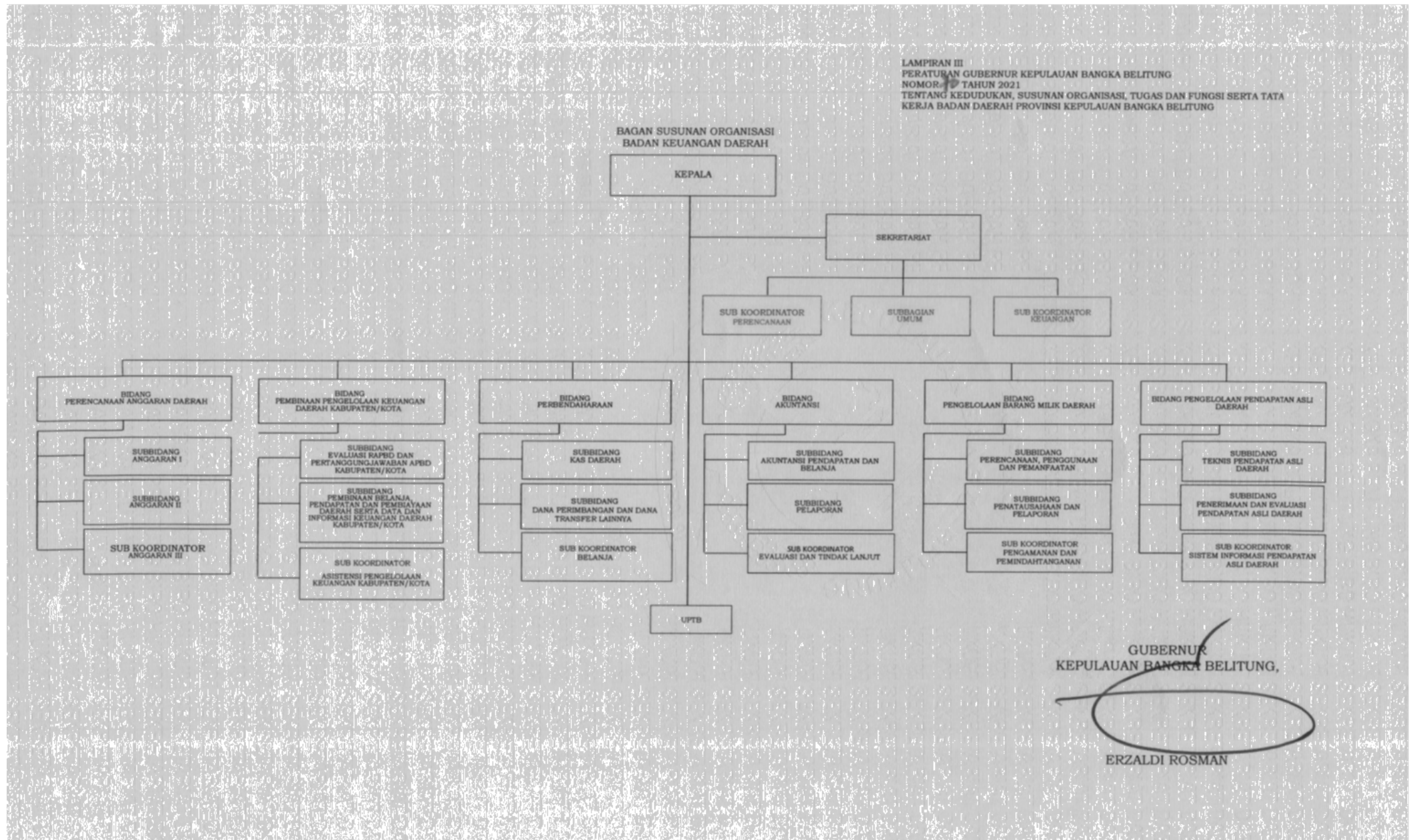
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 10 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional dan Bidang Kerja sebanyak 7 (tujuh) unit.

Dengan cakupan operasional luas wilayah daratan lebih kurang 16.424,23 km² atau 20,10 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbagi dalam 6 (enam) kabupaten dan 1 kota, 47 kecamatan, serta 309 desa dan 78 kelurahan, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis (UPT), 1 (satu) Samsat Corner, 1 (satu) gerai Samsat, 4 (empat) unit Samsat Keliling, 14 (empat belas) Kendaraan Roda 2 Setempoh yang mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Selain Kelompok Jabatan Fungsional Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 10 tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari :

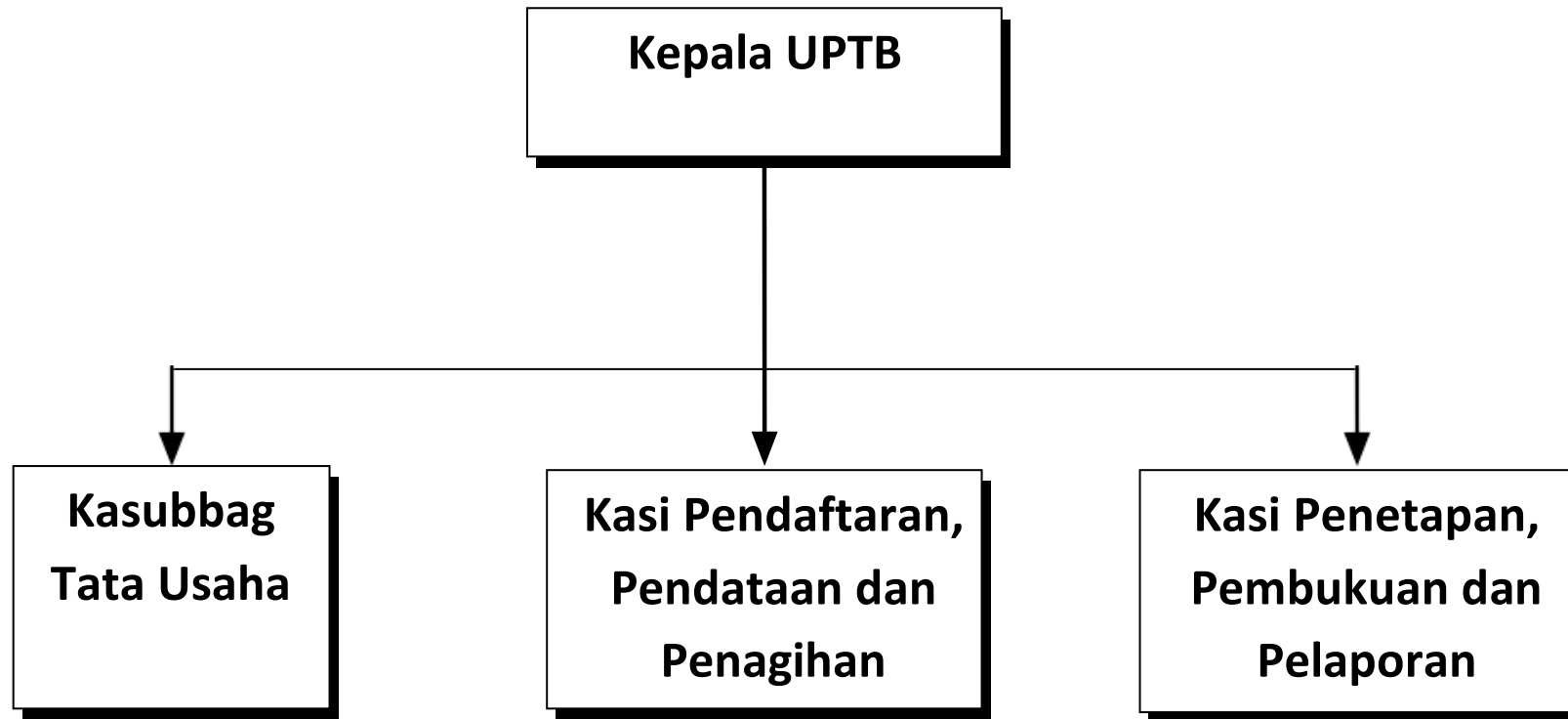
- 1 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kota Pangkalpinang;
- 2 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka;
- 3 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Tengah;
- 4 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Selatan;
- 5 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Bangka Barat;
- 6 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung;
- 7 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Adapun struktur organisasi Badan Keuangan Daerah adalah sesuai Gambar dibawah :

Gambar II.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Gambar II.2
Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis



II.2 SUMBER DAYA

II.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didukung sebanyak 256 pegawai (data per Maret 2022), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. II.1
Klasifikasi PNS dan CPNS di Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	BAKUDA	BELITUNG	BELITUNG TIMUR	BANGKA	BANGKA SELATAN	BANGKA BARAT	BANGKA TENGAH	PANGKAL PINANG	JUMLAH
S2	18	-	0	1	1	1	1	2	24
S1/D4	67	5	6	4	4	5	5	21	117
D3	23	7	5	10	10	6	7	5	73
SLTA	15	5	5	1	1	4	2	9	42
SLTP	0	-						0	0
JUMLAH	123	17	16	16	16	16	15	37	256

II.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Badan Keuangan Daerah menempati Kantor di Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Belitung nomor 4, Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang.

Dalam Neraca Keuangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, tercatat jumlah kekayaan tetap milik Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 44.714.563.125,46 (Empat puluh empat milyar tujuh ratus empat belas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus dua puluh lima koma empat puluh enam rupiah) dan sampai dengan tahun 2021 tercatat kekayaan tetap Badan Keuangan Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebesar Rp. 41.651.053.938,46 (empat puluh satu milyar enam ratus lima puluh satu juta lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) atau terjadi penyusutan sebesar Rp. 3.063.509.187 (tiga milyar enam puluh tiga juta lima ratus Sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).

Tabel berikut menyajikan Neraca Manual Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2021 :

Tabel. II.3
Neraca Manual Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(per 31 Desember 2021)

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas Lainnya	26.709.602,00	26.709.602,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	39.928.200,00	39.928.200,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	776.873.334,12	1.090.719.613,24
JUMLAH ASET LANCAR	843.511.136,12	1.157.357.415,24
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	6.015.770.640,00	6.015.770.640,00
Peralatan dan Mesin	34.268.274.623,48	34.607.444.159,48
Gedung dan Bangunan	39.321.132.314,98	39.321.132.314,98
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.075.121.332,00	1.085.567.761,00
Aset Tetap Lainnya	65.376.254,00	70.237.256,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(39.094.621.226,00)	(36.385.589.006,00)
JUMLAH ASET TETAP	41.651.053.938,46	44.714.563.125,46
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

URAIAN	2021	2020
ASET		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	1.223.196.697,00	1.274.341.697,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET LAINNYA	1.223.196.697,00	1.274.341.697,00
JUMLAH ASET	43.717.761.771,58	47.146.262.237,70
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	26.700.000,00	26.700.000,00
Utang Belanja	1.308.621.732,00	1.342.891.124,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	9.602,00	9.602,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.335.331.334,00	1.369.600.726,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.335.331.334,00	1.369.600.726,00
EKUITAS		
EKUITAS	42.382.430.437,58	45.776.661.511,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	43.717.761.771,58	47.146.262.237,70

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan kepada masyarakat pada Kantor bersama.

Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, pada tahun 2016 telah dibangun Samsat Corner pada Mall Bangka Trade Centre (BTC) bertempat di Lantai 3 dan pada tahun 2021 dibuka Gerai Samsat di Transmart Mall yang ada di Pangkalpinang.

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan Pajak Daerah, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah mengoperasikan 4 (empat) unit kendaraan Samsat Keliling untuk daerah operasional Pulau Bangka 2 (dua) unit dan daerah operasional Pulau Belitung 2 sebanyak (dua) unit. Selain itu pada masing-masing UPTB telah ditambahkan kendaraan operasional roda 2 sebanyak 2 (dua) unit

per UPTB untuk kendaraan samsat Setempoh yang telah beroperasional sejak 2018. Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan operasional pelayanan untuk 7 (tujuh) bidang dan Sekretariat maupun 7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis, telah dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana tabel dibawah.

Tabel. II.4
Rekapitulasi Barang Milik Daerah pada
Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(per 31 Desember 2021)

No	Uraian	Nilai (Dalam ribuan rupiah)
1	Tanah	6.015.770.640,00
2	Peralatan dan Mesin	34.268.274.623,48
3	Gedung dan Bangunan	39.321.132.314,98
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.075.121.332,00
5	Aset Tetap Lainnya	65.376.254,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(39.094.621.226,00)
	JUMLAH ASET TETAP	41.651.053.938,46

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Badan Keuangan Daerah telah melaksanakan perubahan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Berdasarkan Renstra Perubahan tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan 8 Indikator Kinerja Utama baru pada tahun 2021-2022 yang sebelumnya terdapat 6 Indikator Kinerja Utama.

Dari sasaran strategis yang telah ditetapkan rata-rata capaian setiap tahun sejak 2018-2021 adalah sebesar 94.27 %, dengan capaian rata-rata tertinggi tahun 2020 yaitu

sebesar 99.81% dan capaian terendah pada 2021 yaitu sebesar 88.79%.

Rata-rata Capaian tertinggi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 dicapai pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 81.50 sedangkan realisasi nya sebesar 84.43 atau terealisasi sebesar 103.6%, sedangkan capaian indikator Kinerja Utama yang terendah pada tahun 2020 adalah indikator prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD yang ditargetkan sebesar 12.48 % namun teralisasi sebesar 10.22% atau teralisasi sebesar 81.91%.

Pada Tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan badan Keuangan Daerah penetapan perubahan IKU telah ditetapkan, dengan capaian pada tahun 2021 rata-rata terealisasi sebesar 88.79%.

Rata-rata Capaian terendah Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 dicapai pada Nilai RB Perangkat Daerah, pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 22 sedangkan realisasi nya sebesar 22.22 atau terealisasi sebesar 100.91%, sedangkan capaian indikator Kinerja Utama yang terendah pada tahun 2021 adalah indikator Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota yang ditargetkan sebesar 75 namun teralisasi sebesar 0 atau teralisasi sebesar 0%. Tidak terealisasinya Indikator Kinerja Utama ini adalah dikarenakan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia belum bias dilaksanakan sepenuhnya hingga tahun 2021. Saat ini Kementerian Dalam Negeri masih membangun system informasi yang akan dipergunakan untuk menilai IPKD Kabupaten/Kota.

Tabel berikut memberikan gambaran tentang pencapaian Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 :

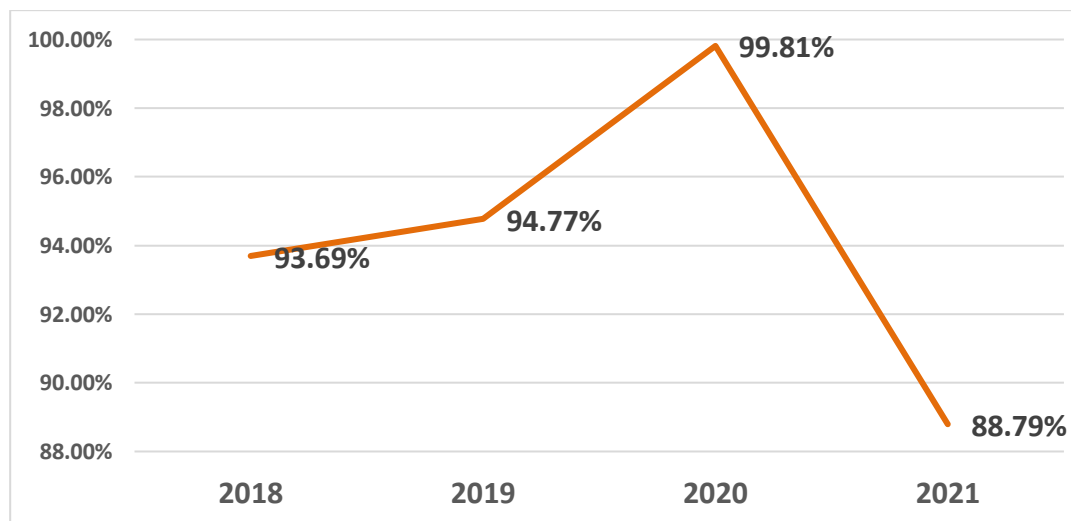
Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD				84,85%	87,32%	87,52%	88,19%	88,82%	92,54%	91,42%	89,78%		-	109,06%	104,70%	102,58%		
2	prosentase kontribusi Retribusi daerah dan LLPADS Daerah terhadap PAD				15,15%	12,68%	12,48%	11,81%	11,18%	7,46%	8,58%	10,22%			49,24%	67,70%	81,91%		
3	Prosentase Penata usahaan, Perbendaharaan dan Pelaporan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sesuai peraturan				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	88,89%	100,00%			100,00%	88,89%	100,00%		
4	Nilai aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dapat diyakini kewajarannya				4.633.238.278.093,17	4.929.403.053.587,66	5.244.499.204.715,99	5.579.736.858.451,54	5.936.403.495.221,56	4.515.721.836.673,61	5.254.997.715.052,53	5.810.883.956.196,37			97,46%	106,61%	110,80%		
5	Prosentase ketepatan waktu penetapan APBD dan APBD Perubahan Provinsi dan Kabupaten/Kota				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,07%	100,00%			100,00%	96,07%	100,00%		
6	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah				79,00	80,25	81,50	82,75	84,00	84,03	84,00	84,43			106,37%	104,67%	103,60%		
7	Nilai RB Perangkat Daerah							22	25				22,2					100,91%	
8	Ketepatan waktu Penetapan APBD (1=tidak tepat waktu, 2=tepat waktu)							2	2				2					100,00%	
9	Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (1=tidak tepat waktu, 2=tepat waktu)							2	2				2					100,00%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
10	Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota							75	77				0					0,00%	
11	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK RI Atas LKPD Dalam Pengelolaan BMD							95,5	95,75				95,6					100,10%	
12	Ratio Efisiensi Keuangan Daerah							99,33	99,39				100,59					101,27%	
13	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah							46,73	46,68				50,5					108,07%	
14	Tersedianya Anggaran pada Kas Daerah (1=tidak tersedia, 2=tersedia)							2	2				2					100,00%	
	Rata-rata														93,69%	94,77%	99,81%	88,79%	

Diagram II.1
Tingkatan Rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022



Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai yang direncanakan dalam Renstra dan Perubahannya 2017-2022. Realisasi tertinggi diantara program strategis dalam Rencana Strategis dan Perubahannya terdapat pada program Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah pada tahun 2019 yang teralisasi sebesar 156.70%, dari target pagu Renstra sebesar Rp. 441.684.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) teralisasi sebesar Rp 692.103.285,00 (enam ratus Sembilan puluh dua juta seratus tiga ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah, sedangkan capaian terendah terdapat pada Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi pada tahun 2020 yang terealisasi hanya sebesar 11.09 % atau terealisasi sebesar Rp. 18.225.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari target pagu Renstra sebesar Rp. 164.367.000,00 (Seratus enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah). Dengan pertumbuhan anggaran rata-rata sebesar minus Rp.1.798.805.801,11 (satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima ribu delapan ratus satu koma sebelas rupiah) dan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar minus Rp. 141.491.252,8 (seratus empat puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma delapan rupiah) Ratio realisasi program rata-rata tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yaitu sebesar 97.94%, sementara terendah tercatat pada tahun 2020 yaitu sebesar 81.43%.

Tabel berikut menyajikan data Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah pada masa Renstra dan Perubahannya tahun 2017-2022 : .

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	14.242.602.958	12.744.672.357	17.315.569.000	20.475.404.350	22.899.839.000	13.108.038.365	17.554.907.250	11.555.687.078			92,03%	137,74%	66,74%			2.164.309.010,50	(776.175.643,50)
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	4.693.601.514	5.316.156.000	6.147.373.100	7.069.476.250	7.284.527.275	3.862.555.028	5.412.012.105	6.342.550.137			82,29%	101,80%	103,17%			647.731.440,25	1.239.997.554,50
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	539.812.100	124.399.250	173.058.450	152.580.300	224.901.000	476.881.634	52.089.000	198.651.970			88,34%	41,87%	114,79%			(78.727.775,00)	(139.114.832,00)
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	307.701.000	139.628.000	164.367.000	189.021.250	217.373.600	456.507.210	117.246.300	18.225.000			148,36%	83,97%	11,09%			(22.581.850,00)	(219.141.105,00)
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	1.105.197.642	317.128.000	364.697.200	419.399.250	482.308.100	865.196.565	290.600.000	360.746.000			78,28%	91,63%	98,92%			(155.722.385,50)	(252.225.282,50)
Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	1.441.326.800	441.684.000	698.284.300	803.021.500	923.470.000	1.062.476.268	692.103.285	614.268.715			73,72%	156,70%	87,97%			(129.464.200,00)	(224.103.776,50)
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	3.412.555.400	1.057.725.000	1.114.877.500	1.139.159.000	1.298.530.250	2.862.138.573	745.060.900	1.339.804.697			83,87%	70,44%	120,18%			(528.506.287,50)	(761.166.938,00)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.849.219.65	59.135.729.726				60.378.571.403					87,70%		(9.713.489.928,00)	-
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				408.935.924.346	397.715.039.808				352.548.257.690					86,21%		(11.220.884.538,00)	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				512.143.562	543.959.988				374.939.075					73,21%		31.816.426,00	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				1558144148	776.800.423				1224874378					78,61%		(781.343.725,00)	
	3.677.542.487	2.877.341.801	3.711.175.221	46.373.044.873	44.682.043.560	3.241.970.520	3.552.002.691	2.918.561.942	103.631.660.636		92,41%	97,74%	86,12%	81,43%		(1.798.805.801,11)	(141.491.252,88)

2.3.2 Capaian Layanan Kinerja Perangkat Daerah

2.3.2.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Masa Renstra 2017-2022

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan urusan penunjang pemerintah dibidang keuangan pada tataran Perencanaan dan keuangan serta manajemen keuangan Pemerintah Daerah dengan beberapa IKK Outcome

Tabel berikut merupakan capaian kinerja yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

Tabel II.5
Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Badan Keuangan Daerah

IKK OUTCOME	REALISASI	
	2020	2021
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)		
1) IKK Outcome : Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	30%	15,41%
2) IKK Outcome : Rasio PAD	0,91%	1,05%
3) IKK Outcome : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	13,48%	44,72%
4) IKK Outcome : Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)		
1) IKK Outcome : Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,38%	-20,68%
2) IKK Outcome : Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	28,84%	19,54%
3) IKK Outcome : Assets Management		
1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	YA
2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?	YA	YA

(Ya/Tidak)		
3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA	YA
4, Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA	YA
1) IKK Outcome : Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,93%	14,27%

2.3.2.2 Capaian Kinerja Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Masa Renstra 2017-2022

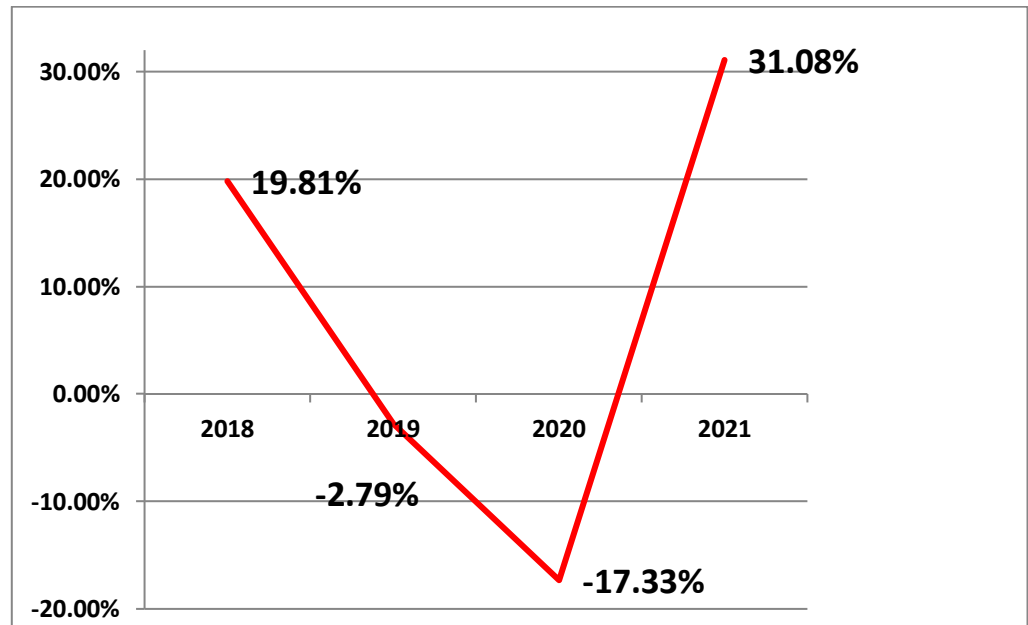
Selain dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2012-2017, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah melaksanakan kinerja layanan Perangkat Daerah yang menjadi Tugas dan Fungsi sebagai mana telah diamanahkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 70 Tahun 2021, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka berfluktuatif sejak tahun 2017, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7.69% pertumbuhan PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh dibawah 0% pada tahun 2019 dan 2019 dikarenakan merebaknya Pandemi Covid 19. Namun kembali rebound pada tahun 2021 dengan capaian pertumbuhan sebesar 31.08%. Sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 tercatat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

U R A I A N	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA
PENDAPATAN	2018	2019	2020	2021	
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	25,13%	-3,33%	-19,37%	32,63%	8,76%
Pendapatan Retribusi Daerah	40,09%	14,69%	-25,41%	-7,05%	5,58%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-3,62%	6,42%	0,53%	4,45%	1,94%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-27,84%	2,08%	12,23%	21,55%	2,00%
Jumlah	19,81%	-2,79%	-17,33%	31,08%	7,69%

D.2 Diagram Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022



Pertumbuhan rata-rata PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2017-2022 tercatat sebesar Rp. 46.509.784.884,44 (empat puluh enam milyar lima ratus Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat koma empat puluh empat rupiah) dengan Pendapatan PAD tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 895.871.321.356,25 (delapan ratus Sembilan puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam koma dua puluh lima rupiah) dan paling rendah tercatat pada tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 683.432.674.809,81 (enam ratus delapan puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus Sembilan koma delapan puluh satu rupiah).

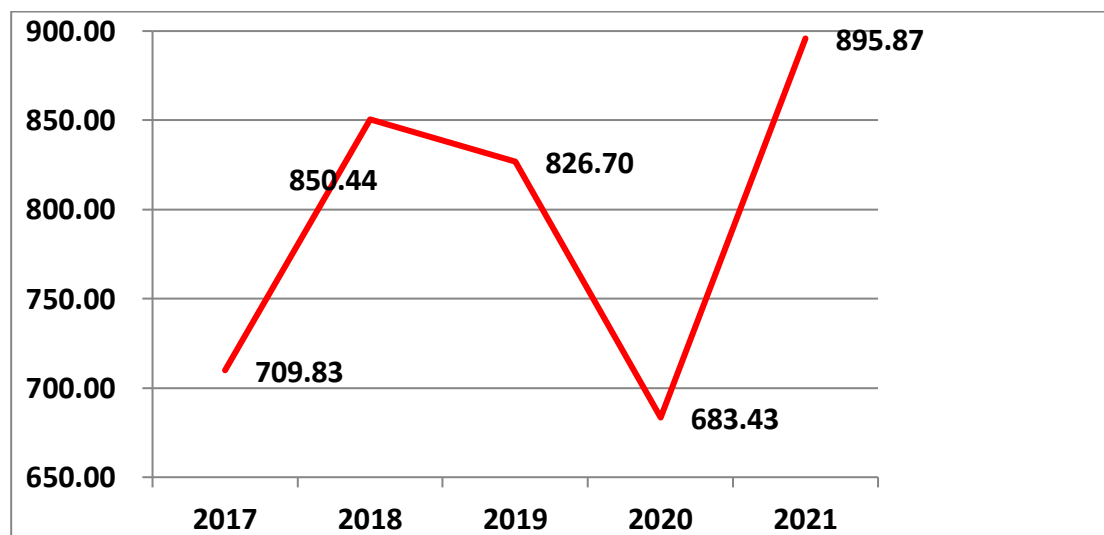
Penyumbang terbesar PAD adalah pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor yang rata-rata terealisasi Rp 743.914.644.805,39 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar Sembilan ratus empat belas juta enam ratus empat-puluh empat ribu delapan ratus lima koma tiga puluh Sembilan rupiah) atau berkontribusi sebesar rata-rata 91.38%, sedangkan penyumbang PAD terkecil adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan rata-rata realisasi sebesar Rp. 5.435.491.960,07 (lima milyar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu Sembilan ratus enam puluh koma tujuh rupiah).

Tabel berikut menggambarkan pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 :

Tabel II. 6 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO.	U R A I A N	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA	% PAD
1	PENDAPATAN							
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
3	Pendapatan Pajak Daerah	629.136.457.212,39	787.235.420.038,83	760.997.424.482,42	613.615.822.923,72	813.809.911.776,58	743.914.644.805,39	91,38%
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.434.540.818,00	7.613.352.047,00	8.731.932.753,00	6.513.383.818,00	6.054.385.795,00	7.228.263.603,25	0,89%
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.306.417.427,05	5.114.092.291,88	5.442.309.381,71	5.471.185.541,79	5.714.380.624,89	5.435.491.960,07	0,67%
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	69.954.766.361,04	50.478.910.453,64	51.529.428.714,94	57.832.282.526,30	70.292.643.159,78	57.533.316.213,67	7,07%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	826.701.095.332,07	683.432.674.809,81	895.871.321.356,25	814.111.716.582,37	

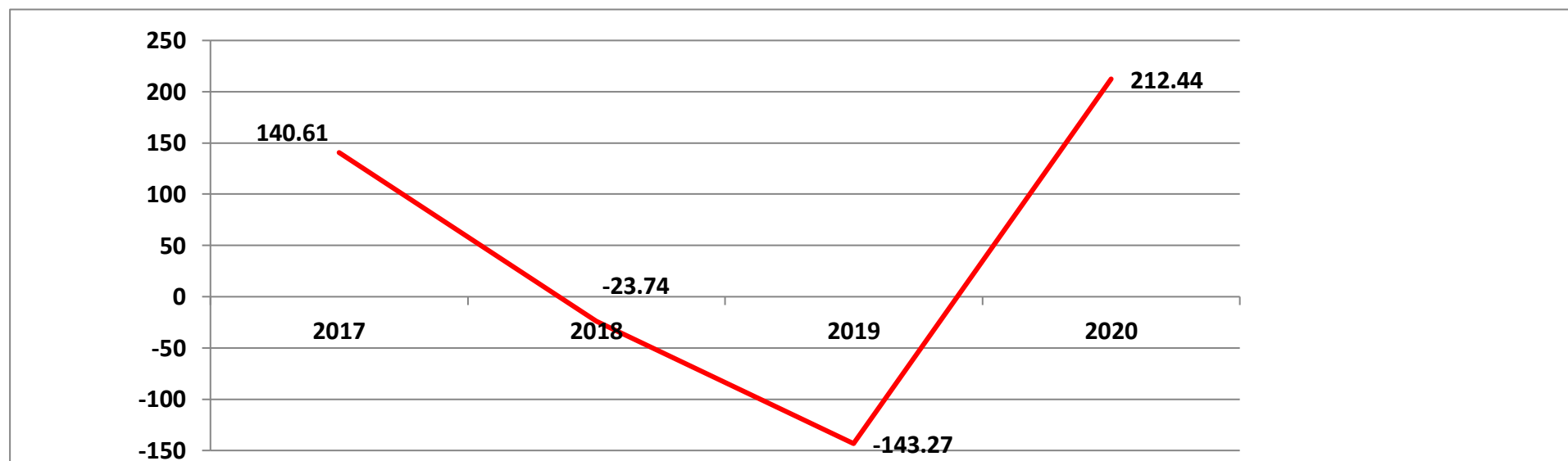
D.3 Diagram Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (dalam Milyar)



Tabel II. 7 Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO.	URAIAN	PERTUMBUHAN PAD				
		REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	RATA-RATA
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah	158.098.962.826,44	(26.237.995.556,41)	(147.381.601.558,70)	200.194.088.852,86	46.168.363.641,05
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2.178.811.229,00	1.118.580.706,00	(2.218.548.935,00)	(458.998.023,00)	154.961.244,25
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(192.325.135,17)	328.217.089,83	28.876.160,08	243.195.083,10	101.990.799,46
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(19.475.855.907,40)	1.050.518.261,30	6.302.853.811,36	12.460.360.633,48	84.469.199,69
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	140.609.593.012,87	(23.740.679.499,28)	(143.268.420.522,26)	212.438.646.546,44	46.509.784.884,44

D.3 Diagram Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Dalam Milyar)



2.3.3 Capaian Kinerja Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Dalam kurun waktu 2017-2022 Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merealisasikan anggaran pelayanan perangkat daerah sebesar Rp. 120.628.597.156,86 (Seratus dua puluh milyar enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam koma delapan puluh enam rupiah) dengan nilai tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 414.526.642.546,96 (empat ratus empat belas milyar lima ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus empat puluh enam koma Sembilan puluh enam rupiah).

Tabel berikut menyajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 :

Tabel T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	14.242.602.958,00	12.744.672.357,00	17.315.569.000,00			13.108.038.365,00	17.554.907.250,46	11.555.687.078,00			92,03%	137,74%	66,74%			(4.747.534.319,33)	(776.175.643,50)
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	4.693.601.514,00	5.316.156.000,00	6.147.373.100,00			3.862.555.028,00	5.412.012.105,00	6.342.550.137,00			82,29%	101,80%	103,17%			(1.564.533.838,00)	1.239.997.554,50
Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Yang Sah	539.812.100,00	124.399.250,00	173.058.450,00			476.881.634,00	52.089.000,00	198.651.970,00			88,34%	41,87%	114,79%			(179.937.366,67)	(139.114.832,00)
Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi	307.701.000,00	139.628.000,00	164.367.000,00			456.507.210,00	117.246.300,00	18.225.000,00			148,36%	83,97%	11,09%			(102.567.000,00)	(219.141.105,00)
Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan	1.105.197.642,00	317.128.000,00	364.697.200,00			865.196.565,00	290.600.000,00	360.746.000,00			78,28%	91,63%	98,92%			(368.399.214,00)	(252.225.282,50)
Peningkatan Tata Kelola Asset Daerah	1.441.326.800,00	441.684.000,00	698.284.300,00			1.062.476.268,00	692.103.285,00	614.268.715,00			73,72%	156,70%	87,97%			(480.442.266,67)	(224.103.776,50)
Program Penganggaran Pembangunan Daerah	3.412.555.400,00	1.057.725.000,00	1.114.877.500,00			2.862.138.573,00	745.060.900,00	1.339.804.697,00			83,87%	70,44%	120,18%			(1.137.518.466,67)	(761.166.938,00)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.849.219.654,00	59.135.729.726				60.378.571.403,30					87,70%	(9.713.489.928,00)	-
Program Pengelolaan Keuangan Daerah				408.935.924.346,00	397.715.039.808				352.548.257.690,66					86,21%	(11.220.884.538,00)	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				512.143.562	543.959.988				374.939.075					73,21%	31.816.426,00	-
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				1558144148	776.800.423				1224874378					78,61%	(781.343.725,00)	-
	25.742.797.414,00	20.141.392.607,00	25.978.226.550,00	479.855.431.710,00	458.171.529.945,00	22.693.793.643,00	24.864.018.840,46	20.429.933.597,00	414.526.642.546,96		88,16%	123,45%	78,64%	86,39%	(21.683.901.765,00)	(1.131.930.023,00)

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah selama 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

II.4.1 Tantangan

1. Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah;
3. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah;
6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah;
7. Lemahnya identifikasi potensi untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal;
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat.

II.4.2 Peluang

1. Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola sesuai dengan Kapabilitas Pemerintah Daerah;
2. Pelayanan pajak dan retribusi yang mudah diakses oleh masyarakat;
3. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD;
4. Masih tersedianya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. Penyesuaian Tarif pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komitmen pimpinan daerah dalam penertiban pengelolaan barang milik daerah;
7. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan APBD;
8. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD;
9. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi;
10. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi;
11. Pengelolaan Manajemen Kas Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang keuangan;
- e. penyelenggaraan administrasi Badan Keuangan Daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan semakin berkembangnya tata kelola pemerintah yang selalu menuntut kearah perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) memberikan arahan kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendukung upaya Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam kurun Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 masih banyak permasalahan-permasalahan umum yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya terutama dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dibuat petunjuk teknisnya dalam beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri diantaranya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara umum permasalahan pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya tingkat pelayanan publik yang inovatif, cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan standar pelayanan publik sehingga pelayanan publik yang lebih memperhatikan kondisi perubahan kebutuhan masyarakat belum dapat terwujud	Masih rendahnya nilai SAKIP, RB dan Survey Kepuasan Internal Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sinkronisasi dokumen perencanaan yang kurang maksimal
			Penatausahaan keuangan pada SIPD belum maksimal
			Penataan kepegawaian masih terkendala pada implementasi sistem kepegawaian yang dibangun
			Pengelolaan barang persediaan belum maksimal
			Penghematan penggunaan sumber daya belum berjalan dengan baik
			Banyaknya BMD yang tidak berfungsi secara normal
			Pemeliharaan BMD belum dapat dilaksanakan secara maksimal
2.	Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Tahapan-tahapan penyusunan APBD terkadang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dikarenakan terlambatnya kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif	Implementasi SIPD untuk melaksanakan penyusunan APBD masih mengalami kendala yang bersifat teknis pada tataran Perangkat Daerah
		Implementasi penggunaan SIPD oleh kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan dengan baik	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang baru
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang baru
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan yang baru
			Penyaluran bantuan keuangan terkendala pada pemenuhan dokumen syarat pencairan oleh Pemerintah kabupaten/Kota

		Belum terpenuhinya kepatuhan dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah oleh Perangkat Daerah	Rekonsiliasi BMD tidak dapat dilakukan dengan cepat dalam memenuhi ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah
		Intensifikasi pendapatan Pajak dan Retribusi daerah tidak diiringi dengan peningkatan koordinasi internal perangkat daerah terkait yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah	Lemahnya pengawasan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya

III.1.1 Kondisi saat ini

III.1.1.1 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh rata-rata 8.60% dalam kurun 2017-2022, terendah tahun 2020 tergerus pada -21.40% dan rebound kembali pada tahun 2021 yang tumbuh sebesar 30.72%. Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.910.558.114.251.24 (Satu trilyun Sembilan ratus sepuluh milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus empat belas ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh empat rupiah) dan tercatat paling rendah pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 1.461.564.880.621.51 (satu trilyun empat ratus enam puluh satu milyar lima ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh satu koma lima puluh satu rupiah).

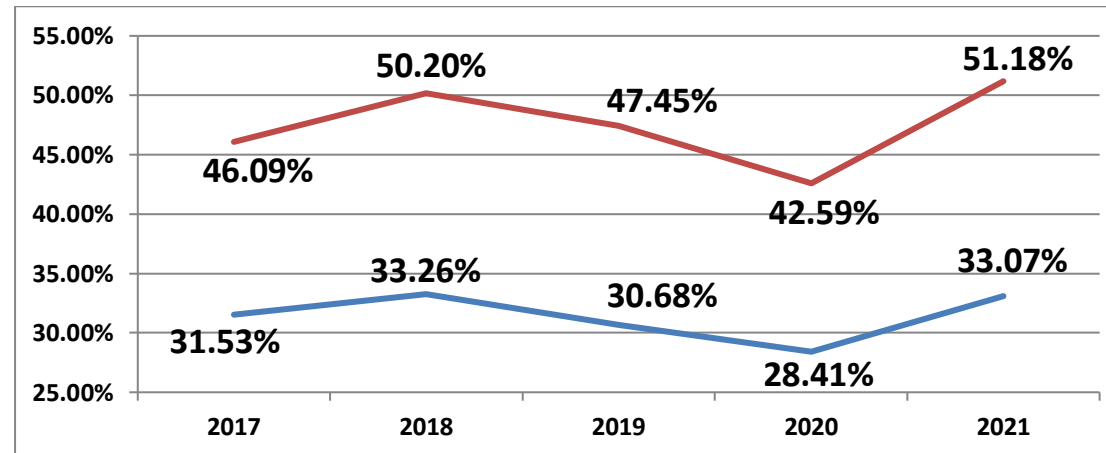
Dengan pertumbuhan rata-rata PAD sebesar 7.69%, Pendapatan Daerah sebesar 5.22% dan Pendetatan dana transfer sebesar 3.51%, Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh rata-rata sebesar 0.38% dan Ratio Ketergantungan Daerah tumbuh rata-rata sebesar 1.27%. Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat paling tinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 33.26% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 28.41%, sementara itu Ratio Ketergantungan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat paling tinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 51.18% dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 42.59%

Tabel berikut menggambarkan kondisi keuangan daerah pada tahun 2017-2022 :

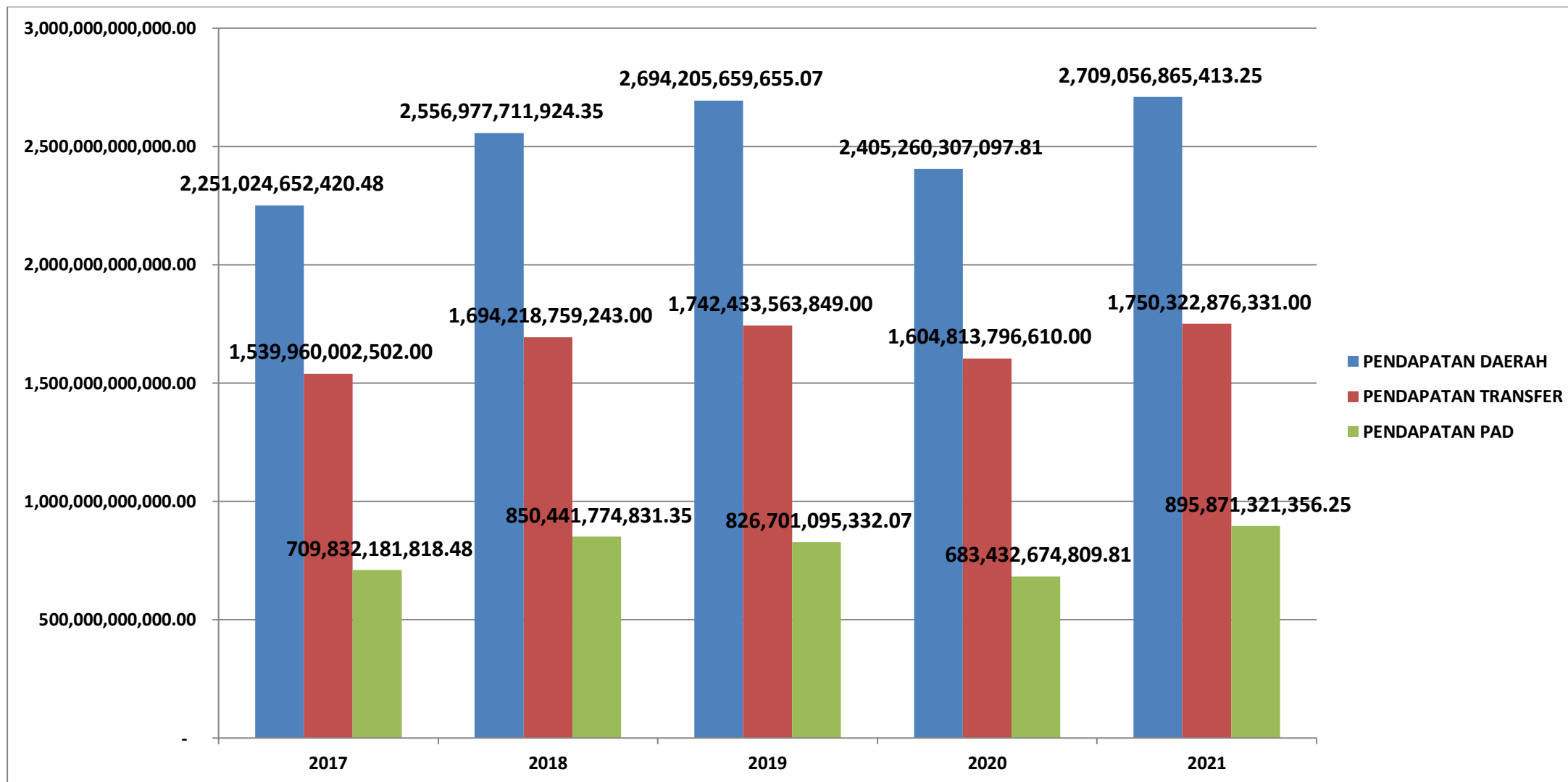
Tabel III.1
Kondisi Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
REALISASI PENDAPATAN	2.251.024.652.420,48	2.556.977.711.924,35	2.694.205.659.655,07	2.405.260.307.097,81	2.709.056.865.413,25
REALISASI PENAPATAN TRANSFER	1.539.960.002.502,00	1.694.218.759.243,00	1.742.433.563.849,00	1.604.813.796.610,00	1.750.322.876.331,00
REALISASI PAD	709.832.181.818,48	850.441.774.831,35	826.701.095.332,07	683.432.674.809,81	895.871.321.356,25
REALISASI BELANJA PEGAWAI	764.209.587.812,21	696.675.458.111,62	834.688.294.949,01	943.695.426.476,30	798.498.751.162,01
RATIO KEMANDIRIAN DAERAH	31,53%	33,26%	30,68%	28,41%	33,07%
RATIO KETERGANTUNGAN DAERAH	46,09%	50,20%	47,45%	42,59%	51,18%
RATIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	1.486.815.064.608,27	1.860.302.253.812,73	1.859.517.364.706,06	1.461.564.880.621,51	1.910.558.114.251,24

Diagram III.1
Ketergantungan Keuangan Daerah VS Kemandirian Keuangan Daerah



**Diagram III.2
Realisasi Pendapatan Daerah**



III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TAHUN 2023-2026

Dalam Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 telah ditetapkan visi daerah yaitu : **“TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”**.

Visi ini pada dasarnya meletakkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (*sustainable growth through poverty*) sebagai motor pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya akan menggerakkan bidang-bidang pembangunan lainnya, seperti fungsi pendidikan, kesehatan, sosial-budaya dan lainnya. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Terciptanya lapangan kerja akan meningkatnya pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat untuk membiayai (*ability to pay*) pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa publik lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Meningkatnya kapasitas SDM akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pada akhirnya tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera akan tercapai.

Sedangkan misi Dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 ada 5 (lima) misi yaitu :

1. Mengembangkan potensi ekonomi lokal yang sejalan dengan upaya mewujudkan wilayah agri-bahari dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan daya saing daerah akan dilakukan melalui pemanfaatan potensi ekonomi daerah secara optimal dan sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan, khususnya perkebunan, perikanan dan kelautan; industri pengolahan dan pariwisata sesuai dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang orientasi pemasarannya terutama ke luar daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; pembangunan sarana dan prasarana ekonomi; serta reformasi di bidang peraturan dan perijinan.
2. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek yang berbasis potensi lokal serta pemantapan lmtaq.
3. Penguatan ketatapemerintahan yang baik (*good local governance*) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil.

4. Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan melalui peningkatan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
5. Penciptaan lingkungan hidup yang asri, nyaman dan lestari bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Badan Keuangan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Daerah dalam urusan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah akan mendukung misi ke-3 dari RPJPD yaitu : ***“Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil”***

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 telah ditetapkan beberapa tujuan yaitu :

1. Tujuan 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator kinerja pertumbuhan PDRB.
2. Tujuan 2 : Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Tujuan 3 : Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi, dengan indikator kinerja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.
4. Tujuan 4 : Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi.
5. Tujuan 5 : Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat, dengan indikator kinerja : (a) Indeks Williamson, (b) Indeks Gini
6. Tujuan 6 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam, dengan indikator kinerja : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung tujuan 4 dari Rencana pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi”***

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 telah ditetapkan sembilan belas sasaran yaitu ;

1. Sasaran 1 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian
2. Sasaran 2 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan
3. Sasaran 3 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian
4. Sasaran 4 : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
5. Sasaran 5 : Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan, dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan.
6. Sasaran 6 : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik
7. Sasaran 7 : Laju Pertumbuhan Ekspor, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Ekspor
8. Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah, dengan indikator kinerja : Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah
9. Sasaran 9 : Meningkatnya Pembangunan Manusia, dengan indikator kinerja : Indeks Pembangunan Manusia
10. Sasaran 10 : Meningkatnya Pembangunan Demokrasi, dengan indikator kinerja : Indeks Demokrasi Indonesia
11. Sasaran 11 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi
12. Sasaran 12 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur, dengan indikator kinerja : Persentase Ketersediaan Infrastruktur
13. Sasaran 13 : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang, dengan indikator kinerja : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang
14. Sasaran 14 : Menurunnya Resiko Bencana, dengan indikator kinerja : Indeks Kapasitas Daerah.
15. Sasaran 15 : Indeks Kapasitas Daerah, dengan indikator kinerja : Indeks Desa Membangun.
16. Sasaran 16 : Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk, dengan indikator kinerja : Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
17. Sasaran 17 : Menurunkan Tingkat Kemiskinan, dengan indikator kinerja : Persentase Angka Kemiskinan.

18. Sasaran 18 : Meningkatkan Kesempatan Kerja, dengan indikator kinerja : Tingkat Pengangguran Terbuka.

19. Sasaran 19 : Meningkatkan Pengendalian Lingkungan

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung Sasaran 11 dari Rencana pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi"

Tabel Berikut ini merupakan tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026 :

Tabel III.2
Tujuan RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026
Yang Akan Di Dukung Oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	Kondisi Awal RPD	TARGET				Kondisi akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	5,05	4,28	4,39	4,46	4,78	5,78
2	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
3	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi.	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	81,42
4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
5	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Williamson	0,190	0,184	0,181	0,178	0,176	0,177
		Indeks Gini	0,247	0,239	0,229	0,224	0,217	0,217
6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,70	77,50	77,50

Tabel III.3
Sasaran RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026
Yang Akan Di Dukung Oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPD	TARGET				Kondisi akhir RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian	7,78*	4,03	4,23	4,43	4,60	4,60
2	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	-9,76	3,85	4,05	4,25	4,45	4,45
3	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian	-9,23	2,95	4,52	1,75	0,46	0,46
4	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	-5,64	1,86	3,25	4,50	4,55	4,55
5	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perdagangan	-4,62	6,50	4,94	5,50	5,55	5,55
6	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan asing dan domestik	43,00	2,70	2,63	2,56	2,50	2,50
7	Laju Pertumbuhan Ekspor	Laju Pertumbuhan Ekspor	106,95	8,13	7,51	6,99	6,53	6,53
8	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	Meningkatnya Nilai Investasi (PMA/PMDN) Daerah	-39,68	25,00	30,00	30,77	34,12	34,12
9	Meningkatnya Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,69	71,91	72,13	72,35	72,57	72,58
10	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia	77,79	77,39	78,40	79,41	80,42	80,42
11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	66,08	68,25	69,00	69,75	70,50	70,51
12	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Persentase Ketersediaan Infrastruktur						
13	Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Pewujudan Tertib Tata Ruang	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,6	0,65	0,7	0,75	0,8	0,8
14	Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39
15	Percepatan pembangunan kawasan perdesaan	Indeks desa membangun	0,704	0,721	0,730	0,739	0,748	0,748
16	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,93	1,79	1,74	1,70	1,68	1,68
17	Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	4,67	4,30	4,20	4,10	4,01	4,01
18	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,03	4,47	4,39	4,26	4,19	4,19
19	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,05	75,43	75,84	76,7	77,5	77,5

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KEUANGAN 2019-2024 DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 telah ditetapkan target-target prioritas yang ingin dicapai dalam masa 2023-2026. Sebagai bagian pendukung pencapaian sasaran pembangunan tersebut Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga telah menetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai bentuk pelayanan Perangkat Daerah yang harus dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun ke depan.

Telaahan terhadap keterkaitan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel III.4

TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA, RPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN RENSTRA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri RI	Indikator Kinerja	Sasaran pada RPD	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Badan Keuangan Daerah	Indikator Kinerja
Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah	Nilai RB Perangkat Daerah
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD
					Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota
					Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD
					Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)
					Ratio Kemandirian Keuangan Daerah

III.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Secara prinsip Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai Perangkat Daerah yang berfungsi mengawal Arah Kebijakan Perencanaan Keuangan dan Asset Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara normatif akan mengikuti segala ketentuan yang menjadi implikasi penerapan pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 tersebut.

III.5 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Melihat perkembangan dan permasalahan yang terjadi serta kendala dan peluang yang dihadapi maka ada beberapa isu strategis yang sangat berpengaruh terhadap pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

“Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan publik yang inovatif, cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan standar pelayanan publik, untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih memperhatikan kondisi perubahan kebutuhan masyarakat”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 diperlukan langkah-langkah strategi dan arah kebijakan yang diatur dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ingin di capai.

Strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka mengarahkan Program dan Kegiatan hingga Sub Kegiatan Strategis agar tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun secara komprehensif dan berkesinambungan.

IV.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 adalah sebagai berikut : **“Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah”**.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026 telah ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Tabel dibawah ini merupakan ringkasan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam masa 2023-2026 :

Tabel T-C.25
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH /
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEUANGAN DAERAHTAHUN 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TH.1 (2023)	TH. 2 (2024)	TH. 3 (2025)	TH. 4 (2026)
1	2		3	4	5	6	7	8
A	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi			68,25	69,00	69,75	70,50
1			Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah (BAKUDA)	Nilai RB Perangkat Daerah (BAKUDA)	30	35	40	45
2			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100%	100%	100%	100%
3				Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota	75	77	79	81
4				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%
5				Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	WTP	WTP	WTP	WTP
6				Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%
7				Ratio Kemandirian Keuangan Daerah	33,29%	33,45%	33,51%	33,67%

IV.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Badan Keuangan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Visi dan Misi Daerah dalam urusan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah akan mendukung misi ke-3 dari RPJPD yaitu : ***“Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil”***

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung tujuan 4 dari Rencana pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi, dengan Indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi”***

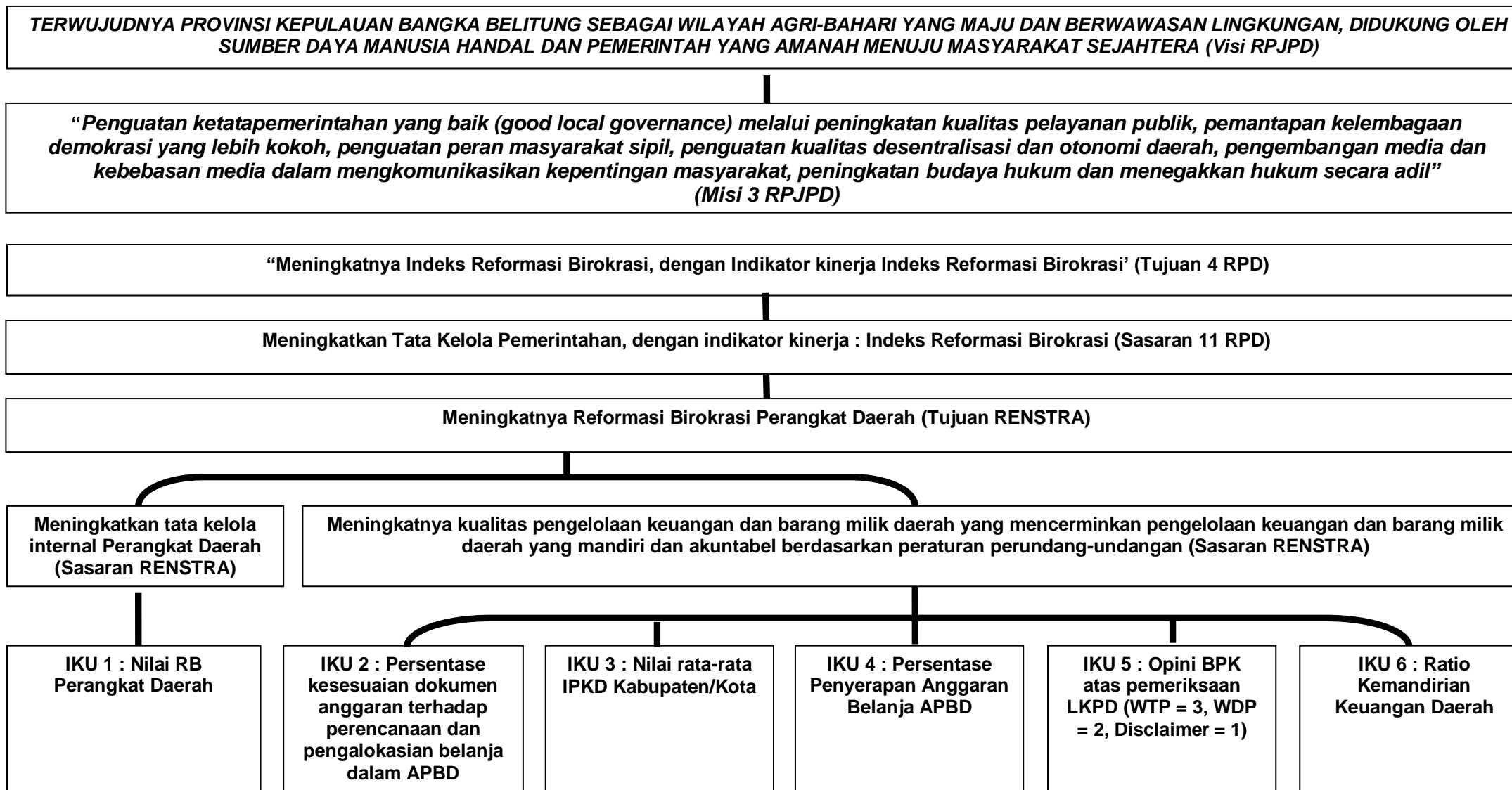
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung Sasaran 11 dari Rencana pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikator kinerja : Indeks Reformasi Birokrasi”***

Pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025, Tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 akan dilakukan dengan mengimplementasikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan melalui Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Strategis secara komprehensif dan kesinambungan dengan tetap memperhatikan kaedah peraturan perundang-undangan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2005-2025 secara efektif dan efisien.

Tabel berikut menggambarkan Arah Dukungan Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 pada pencapaian Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 :

**DIAGRAM 4.1 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA BAKUDA DENGAN RPJPD DAN RPD
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



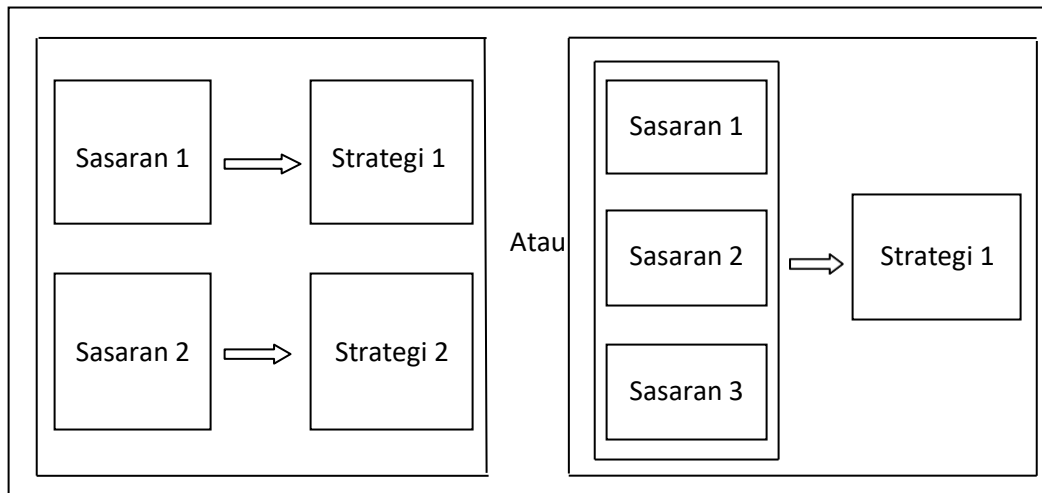
BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat.

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan berikut :

Gambar IV.1. Keterkaitan Sasaran dengan Strategi



Sedangkan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak suatu organisasi agar strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran selalu dalam koridor perencanaan.

Untuk menentukan alternative strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat dilakukan dengan analisis SWOT.

V.1 Analisis Eksternal.

Secara umum analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Peraturan tentang pajak dan retribusi merupakan kewenangan pusat. Data base yang masih kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan. Lemahnya identifikasi potensi retribusi karena keterbatasan kewenangan pungutan, belum adanya peraturan perundangan yang mengikat sebagai bahan pungutan untuk lain-lain pendapatan yang sah, jenis dan ragamnya sangat banyak sehingga pemilahan harus di koordinasikan bersama dari pusat hingga kabupaten/kota.

Peraturan regulasi ditentukan pusat sering berubah dan tidak ada sinkronisasi dan menimbulkan multitafsir. Belum adanya persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan tentang indicator kinerja dari TAPD terhadap implementasi instrumen perencanaan penganggaran.

Dalam pengelolaan kas daerah tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di

masing- masing Perangkat Daerah belum sama. Pencairan anggaran tidak sesuai aliran kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di triwulan IV. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai dasar penghitungan gaji.

Dalam pengelolaan Barang Milik Daerah belum kompetitifnya sumber daya manusia pengelola Barang Milik Daerah menyebabkan masih kurang tertibnya penatausahaan Barang Milik Daerah. Hal ini masih dapat dilihat dari belum terkontrolnya persediaan Barang Persediaan dan Barang Milik Daerah yang mengharuskan dilaksanakannya Rekonsiliasi Barang Milik Daerah secara ketat.

Dalam menganalisis situasi internal lingkungan pelayanan Badan Keuangan Daerah ada beberapa peluang dan ancaman yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yaitu :

a. Peluang

1. Tersedianya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola sesuai dengan Kapabilitas Pemerintah Daerah;
2. Pelayanan pajak dan retribusi yang mudah diakses oleh masyarakat;
3. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD;
4. Masih tersedianya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
5. Penyesuaian Tarif pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komitmen pimpinan daerah dalam penertiban pengelolaan barang milik daerah;
7. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan APBD;
8. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD;
9. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi;
10. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota untuk dievaluasi;
11. Pengelolaan Manajemen Kas Daerah

b. Ancaman

1. Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah
2. Adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor
3. Tidak tepatnya waktu dalam proses penyusunan rancangan APBD
4. Tidak tepatnya waktu dalam proses penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD
5. Terlambatnya waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota
6. Terlambatnya waktu penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

V.2 Analisis Internal.

Analisis internal bertujuan untuk memahami kondisi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan, kekurangan agar dapat dieliminir dampaknya.

Dalam pengelolaan pendapatan, belum definitifnya beberapa Unit Pelaksana Teknis; SDM pengelola pendapatan; Sarana dan prasarana pendukung pengelola pendapatan dan kualitas pelayanan wajib pajak kurang memadai; Pengelolaan belanja daerah belum optimal; penggunaan instrumen ASB dan SPM perencanaan penganggaran serta penyusunan anggaran; Verifikator Perangkat Daerah belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; masih terdapat kesalahan input data dalam SIMDA Keuangan; jaringan komunikasi data yang belum lancar di Perangkat Daerah; permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan out come yang dikehendaki; Selain itu diperlukan masa transisi untuk mengubah Sistem Informasi yang dipakai dari sebelumnya SIPKD menjadi SIMDA Keuangan.

Dalam pengelolaan aset penyusunan RKBMD dan RKPBMDB belum mengacu daftar inventaris barang sebagai dasar pengalokasian anggaran; perencanaan kebutuhan BMD dan RKPBMDB belum mengacu standar sarana dan prasarana.

Dalam menganalisis situasi internal lingkungan pelayanan Badan Keuangan Daerah ada beberapa kekuatan dan kelemahan yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yaitu :

a. Kekuatan

1. Tersedianya regulasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
2. Tersedianya Sistem informasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah
3. Tersedianya website sebagai media informasi publik
4. Tersedianya Potensi sumber-sumber PAD
5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten

b. Kelemahan

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah
2. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
3. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan
4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang

berkesinambungan

5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah
6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah
7. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal
8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat

Dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan internal dan eksternal Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dipetakan menjadi analisa SWOT sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.2
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Tersedianya Sistem informasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 3. Tersedianya website sebagai media informasi publik 4. Tersedianya Potensi sumber-sumberPAD 5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah 2. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan 4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan 5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah 6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah 7. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal 8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat

PELUANG	ANCAMAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pajak dan retribusi yang mudah diakses oleh masyarakat 2. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD 3. Masih tersedianya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 4. Pengembangan Kualitas dan kapabilitas Sumber Daya Aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah 5. Penyesuaian Tarif pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Komitmen pimpinan daerah dalam penertiban pengelolaan barang milik daerah 7. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan APBD 8. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD 9. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota 10. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota 11. Pengelolaan Manajemen Kas Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah; 3. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan; 5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah; 6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah; 7. Lemahnya identifikasi potensi untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal; 8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat

**Tabel IV.3
Analisis SWOT**

<p align="center">INTERNAL FACTOR</p> <p align="center">EXTERNAL FACTOR</p>	<p align="center">KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya regulasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 2. Tersedianya Sistem informasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah 3. Tersedianya website sebagai media informasi publik 4. Tersedianya Potensi sumber-sumberPAD 5. Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkompeten 	<p align="center">KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah 2. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 3. Masih kurangnya kuantitas sumber daya aparatur pada Unit Pelaksana Teknis Badan dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan keuangan 4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan 5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik Daerah 6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah 7. Lemahnya identifikasi potensi karena keterbatasan kewenangan pungutan untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal 8. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat
	<p align="center">PELUANG (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pajak dan retribusi yang mudah diakses oleh masyarakat 2. Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi terbesar dalam peningkatan PAD 3. Masih tersedianya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 4. Pengembangan Kualitadan kapabilitas sumber Daya Aparatur pengelolaan keuangan dan asset daerah 	<p align="center">STRATEGI (O-S)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak tidak memenuhi kewajibannya • Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak tidak memenuhi kewajibannya

<p>5. Penyesuaian Tarif pungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>6. Komitmen pimpinan daerah dalam penertiban pengelolaan barang milik daerah</p> <p>7. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan APBD</p> <p>8. Ketaatan waktu dalam proses penyusunan rancangan Perda pertanggungjawaban APBD</p> <p>9. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perka tentang penjabaran APBD Kabupaten/Kota</p> <p>10. Ketepatan waktu penyampaian rancangan Perda pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota</p> <p>11. Pengelolaan Manajemen Kas Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi dan sosialisasi program di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat • 	<p>peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan Dana Bagi Hasil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Pemerintah Kab/Kota
<p style="text-align: center;">ANCAMAN (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya kendala perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD); 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban selaku objek pendapatan daerah; 3. Masih lemahnya Identifikasi, pengkajian dan monitoring terhadap potensi sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah; 4. Masih terbatasnya penyediaan dana untuk prioritas pembangunan yang berkesinambungan; 5. Belum optimalnya pemanfaatan Barang Milik 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (T-O)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan; • Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah 	<p style="text-align: center;">STRATEGI (T-W)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Regulasi, pemanfaatan IT dan Peningkatan kualitas SDM • Melakukan inventarisasi asset daerah yang akan digunakan untuk pemanfaatan asset • Meningkatkan koordinasi dan menjalin hubungan kerja yang baik dengan pihak terkait • Meningkatkan kualitas SDM di bidang Perbendaharaan dan Verifikasi untuk memberikan pelayanan kepada OPD atau

<p>Daerah;</p> <p>6. Belum optimalnya penatausahaan, pengamanan dan pengawasan Barang Milik Daerah;</p> <p>7. Lemahnya identifikasi potensi untuk retribusi daerah dan anggaran sosialisasi dan promosi terbatas, serta system pengawasan retribusi kurang optimal;</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat</p>		<p>Pihak ketiga serta meningkatkan penyampaian informasi secara transparan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu
---	--	---

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

<i>TERWUJUDNYA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI WILAYAH AGRI-BAHARI YANG MAJU DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA HANDAL DAN PEMERINTAH YANG AMANAH MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (Visi RPJPD)</i>				
<i>“Penguatan ketatapemerintahan yang baik (good local governance) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemantapan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, penguatan peran masyarakat sipil, penguatan kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat, peningkatan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil” (Misi 3 RPJPD)</i>				
Tujuan 4 RPD : Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi		Indikator kinerja Tujuan 4 RPD : Indeks Reformasi Birokrasi		
	Sasaran 11 RPD : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	indikator kinerja Sasaran 11 RPD : Indeks Reformasi Birokrasi		
TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/IKU	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah (BAKUDA)	Nilai RB Perangkat Daerah (BAKUDA)	Melaksanakan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan prinsip akuntabel, efektifitas dan efisien
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	Melaksanakan Penyusunan APBD yang sinkron dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan mandatory perundang-undangan	Peningkatan Implementasi Penganggaran keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) disertai dengan penguatan koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah Daerah

		Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi	Peningkatan Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota yang diimplementasikan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	Melaksanakan Penatausahaan Perbendaharaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Implementasi Penatausahaan Perbendaharaan keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
		Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	Melaksanakan Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dalam Implementasi Penatausahaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan
			Melaksanakan tata kelola Barang Milik Daerah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Kapasitas kelembagaan dalam tata kelola Barang Milik Daerah yang dapat menyajikan kewajaran dan Kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Ratio Kemandirian Keuangan Daerah	Melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah semaksimal mungkin dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada dan peningkatan jumlah objek pajak daerah potensial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang melaksanakan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan memiliki 4 (empat) Program Pembangunan Prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2023-2026.

4 (empat) Program Pembangunan Prioritas tersebut akan mendukung 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah dipaparkan pada Bab IV.

Adapun Program Prioritas Pembangunan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program pengelolaan pendapatan daerah

Untuk melaksanakan semua program Prioritas tersebut di perlukan pendanaan sebesar Rp. 2.349.647.142.465,92 (Dua trilyun tiga ratus empat puluh Sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh lima koma Sembilan puluh dua rupiah) selama masa Renstra tahun 2023-2026.

Adapun jumlah pendanaan tersebut terbagi dalam beberapa Jenis Belanja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Unit Kerja sebagaimana dijelaskan dalam table dibawah ini :

Tabel VI.1
Rencana Belanja (Pendanaan) Program dan Kegiatan Berdasarkan Jenis Belanja

Uraian	2023	2024	2025	2026
Belanja Pegawai	Rp 57.866.884.184,01	Rp 60.760.228.393,21	Rp 63.798.239.812,87	Rp 66.988.151.803,51
Belanja barang/jasa	Rp 25.622.340.094,00	Rp 27.096.104.307,70	Rp 28.576.483.148,09	Rp 30.133.430.480,49
Belanja Modal	Rp 5.926.373.619,00	Rp 3.157.047.081,65	Rp 5.707.508.810,23	Rp 4.773.886.750,44
Belanja Transfer	Rp 458.607.023.000,00	Rp 434.466.200.700,00	Rp 456.189.510.735,00	Rp 478.998.986.271,75
Belanja Tak terduga	Rp 32.461.336.000,00	Rp 34.731.948.314,50	Rp 35.660.185.480,23	Rp 38.125.273.479,24
Jumlah Belanja	Rp 580.483.956.897,01	Rp 560.211.528.797,06	Rp 589.931.927.986,41	Rp 619.019.728.785,43

Tabel di bawah ini akan memaparkan rencana Program dan kegiatan Prioritas beserta dengan indikator Kinerja dan perkiraan pendanaan indikatif pada masa Rencana Strategis 2023-2026 :

Tabel VI.2
Rencana Belanja (Pendanaan) Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah (BAKUDA)	Nilai RB Perangkat Daerah (BAKUDA)	30	35	40	45	Rp 81.982.966.693,01	Rp 83.113.927.018,36	Rp 89.705.097.368,78	Rp 93.008.498.011,92
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100%	100%	100%	100%	Rp 1.100.431.204,00	Rp 1.155.452.764,20	Rp 1.213.225.402,41	Rp 1.273.886.672,53
	Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota	75	77	79	81	Rp 1.676.300.000,00	Rp 1.823.755.000,00	Rp 1.984.946.750,00	Rp 2.161.198.487,50
	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	92,50%	93,00%	93,50%	94,00%	Rp 491.463.359.000,00	Rp 469.612.899.014,50	Rp 492.285.183.715,23	Rp 517.581.521.625,99
	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	WTP	WTP	WTP	WTP	Rp 1.262.800.000,00	Rp 1.325.940.000,00	Rp 1.392.237.000,00	Rp 1.461.848.850,00
	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah	33,29%	33,45%	33,51%	33,67%	Rp 2.998.100.000,00	Rp 3.179.555.000,00	Rp 3.351.237.750,00	Rp 3.532.775.137,50
JUMLAH						Rp 580.483.956.897,01	Rp 560.211.528.797,06	Rp 589.931.927.986,41	Rp 619.019.728.785,43

Tabel VI.3
Rencana Belanja (Pendanaan) Program dan Kegiatan Berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	2023	2024	2025	2026
BAKUDA	Rp 568.016.074.388,01	Rp 549.568.640.171,91	Rp 576.296.715.930,51	Rp 605.858.634.852,03
UPTB BANGKA BARAT	Rp 1.166.132.509,00	Rp 994.525.384,50	Rp 1.280.957.903,23	Rp 1.096.680.798,09
UPTB PANGKALPINANG	Rp 1.694.000.000,00	Rp 1.568.950.000,00	Rp 1.847.622.500,00	Rp 1.940.203.625,00
UPTB BELITUNG TIMUR	Rp 1.506.000.000,00	Rp 1.425.290.336,15	Rp 1.711.304.852,96	Rp 1.570.870.095,61
UPTB BANGKA	Rp 2.151.500.000,00	Rp 1.882.575.000,00	Rp 2.377.116.250,00	Rp 2.496.597.062,50
UPTB BANGKA TENGAH	Rp 2.525.450.000,00	Rp 1.662.205.000,00	Rp 2.753.425.500,00	Rp 2.208.768.050,00
UPTB BELITUNG	Rp 1.955.800.000,00	Rp 1.733.975.000,00	Rp 2.020.898.750,00	Rp 2.122.143.687,50
UPTB BANGKA SELATAN	Rp 1.469.000.000,00	Rp 1.375.367.904,50	Rp 1.643.886.299,73	Rp 1.725.830.614,71
	Rp 580.483.956.897,01	Rp 560.211.528.797,06	Rp 589.931.927.986,41	Rp 619.019.728.785,43

		X	X	0	10		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan keuangan	78	58.026.384.184	79	60.927.703.393	80	63.974.088.563	81	67.172.792.991	81	250.100.969.131	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	275 orang	57.866.884.184	275 orang	60.760.228.393	275 orang	63.798.239.813	275 orang	66.988.151.804	1100 orang	249.413.504.194	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	57.750.000	12 dokumen	60.637.500	12 dokumen	63.669.375	48 dokumen	237.056.875	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 dokumen	104.500.000	3 dokumen	109.725.000	3 dokumen	115.211.250	3 dokumen	120.971.813	12 dokumen	450.408.063	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan kepegawaian	77,5	268.500.000	78	281.925.000	78,5	296.021.250	79	310.822.313	79	1.157.268.563	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen	55.000.000	12 dokumen	57.750.000	12 dokumen	60.637.500	12 dokumen	63.669.375	48 dokumen	237.056.875	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	120.000.000	15 orang	126.000.000	15 orang	132.300.000	15 orang	138.915.000	60 orang	517.215.000	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200 orang	93.500.000	200 orang	98.175.000	200 orang	103.083.750	200 orang	108.237.938	800 orang	402.996.688	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	4.047.450.000	77,5	4.249.822.500	78	4.462.313.625	78,5	4.685.429.306	79	17.445.015.431	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	16.500.000	4 paket	17.325.000	4 paket	18.191.250	4 paket	19.100.813	16 paket	71.117.063	BAKUDA	PK.PINANG

		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	4 paket	385.000.000	4 paket	404.250.000	4 paket	424.462.500	4 paket	445.685.625	16 paket	1.659.398.125	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	22.000.000	4 paket	23.100.000	4 paket	24.255.000	4 paket	25.467.750	16 paket	94.822.750	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.365.000.000	12 Paket	2.483.250.000	12 Paket	2.607.412.500	12 Paket	2.737.783.125	48 paket	10.193.445.625	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	35.200.000	15 Dokumen	36.960.000	15 Dokumen	38.808.000	15 Dokumen	40.748.400	60 dokumen	151.716.400	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	35.750.000	12 Laporan	37.537.500	12 Laporan	39.414.375	12 Laporan	41.385.094	48 laporan	154.086.969	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	302.500.000	50 Laporan	317.625.000	50 Laporan	333.506.250	50 Laporan	350.181.563	200 laporan	1.303.812.813	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	1	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	33.000.000	2 Dokumen	34.650.000	2 Dokumen	36.382.500	2 Dokumen	38.201.625	8 dokumen	142.234.125	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	852.500.000	2 Dokumen	895.125.000	2 Dokumen	939.881.250	2 Dokumen	986.875.313	8 dokumen	3.674.381.563	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 dokumen	6.921.200.000	36 dokumen	7.267.260.000	36 dokumen	7.630.623.000	36 dokumen	8.012.154.150	144 dokumen	29.831.237.150	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	44.000.000	12 laporan	46.200.000	12 laporan	48.510.000	12 laporan	50.935.500	48 laporan	189.645.500	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 laporan	242.000.000	12 laporan	254.100.000	12 laporan	266.805.000	12 laporan	280.145.250	48 laporan	1.043.050.250	BAKUDA	PK.PINANG

						Lapangan														
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	13.750.000	5 unit	14.437.500	5 unit	15.159.375	5 unit	15.917.344	5 unit	59.264.219	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 unit	104.500.000	60 unit	109.725.000	60 unit	115.211.250	60 unit	120.971.813	60 unit	450.408.063	BAKUDA	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	302.500.000	1 unit	317.625.000	1 unit	333.506.250	1 unit	350.181.563	1 unit	1.303.812.813	BAKUDA	PK.PINANG
																	-	-	BAKUDA	PK.PINANG
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan						Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD		100%	1.100.431.204	100%	1.155.452.764	100%	1.213.225.402	100%	1.273.886.673	1	4.742.996.043	BAKUDA	BABEL
							Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota		75	1.676.300.000	77	1.823.755.000	79	1.984.946.750	81	2.161.198.488	81	7.646.200.238	BAKUDA	BABEL

							Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	92,5%	491.463.359.000	93,0%	469.612.899.015	93,5%	492.285.183.715	94,0%	517.581.521.626	1	1.970.942.963.356	BAKUDA	BABEL
							Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	WTP	1.262.800.000	WTP	1.325.940.000	WTP	1.392.237.000	WTP	1.461.848.850	WTP	5.442.825.850	BAKUDA	BABEL
							Ratio Kemandirian Keuangan Daerah	33,29%	2.998.100.000	33,45%	3.179.555.000	33,51%	3.351.237.750	33,67%	3.532.775.138	0	13.061.667.888	BAKUDA	BABEL
		5	0	0			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2	1.100.431.204	2	1.155.452.764	2	1.213.225.402	2	1.273.886.673	2	4.742.996.043	BAKUDA	PK.PINANG
							Jumlah kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan	7 Kabupaten/kota	1.676.300.000	7 Kabupaten/kota	1.823.755.000	7 Kabupaten/kota	1.984.946.750	7 Kabupaten/kota	2.161.198.488	7 Kabupaten/kota	7.646.200.238	BAKUDA	PK.PINANG
							persentase realisasi penyediaan dana belanja APBD	92,5%	395.000.000	93,0%	414.750.000	93,5%	435.487.500	94,0%	457.261.875	1	1.702.499.375	BAKUDA	PK.PINANG
							Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (TEPAT WAKTU = 2, TIDAK TEPAT WAKTU = 1)	2	506.550.000	2	531.877.500	2	558.471.375	2	586.394.944	2	2.183.293.819	BAKUDA	PK.PINANG
							persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan terhadap penyaluran Dana Transfer dan BTT	100%	491.068.359.000	100%	469.198.149.015	100%	491.849.696.215	100%	517.124.259.751	1	1.969.240.463.981	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	1.100.431.204	100%	1.155.452.764	100%	1.213.225.402	100%	1.273.886.673	1	4.742.996.043	BAKUDA	PK.PINANG
							Persentase pemenuhan ketaatan pada peraturan dalam penyusunan APBD/Perubahan APBD											BAKUDA	PK.PINANG

		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	90.302.761	2	94.817.899	2	99.558.794	2	104.536.734	2	389.216.188	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	90.302.761	2	94.817.899	2	99.558.794	2	104.536.734	2	389.216.188	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	376.426.591	2	395.247.921	2	415.010.317	2	435.760.832	2	1.622.445.661	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2	449.565.056	2	472.043.309	2	495.645.474	2	520.427.748	2	1.937.681.587	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	93.834.035	2	98.525.737	2	103.452.024	2	108.624.625	2	404.436.420	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi Raperda Pajak dan Retribusi Kab/Kota	2	230.000.000	2	247.000.000	2	265.400.000	2	285.325.000	2	1.027.725.000	BAKUDA	PK.PINANG
								Jumlah dokumen hasil analisa statistik keuangan Pemerintah Daerah	7	100.000.000	7	110.000.000	7	121.000.000	7	133.100.000	7	464.100.000	BAKUDA	PK.PINANG
								Nilai Ketepatan Waktu Evaluasi APBD, Perubahan APBD dan pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	2	465.300.000	2	511.830.000	2	563.013.000	2	619.314.300	2	2.159.457.300	BAKUDA	PK.PINANG

								Persentase kesesuaian Perda APBD kab/kota dan Perkada penjabaran APBD Kabupaten/kota dengan peraturan di atasnya		100%	405.000.000	100%	445.500.000	100%	490.050.000	100%	539.055.000	1	1.879.605.000	BAKUDA	PK.PINANG
								Laporan Hasil Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD dan Pemerintah Kabupaten/Kota		1 laporan	283.500.000	1 laporan	297.675.000	1 laporan	312.558.750	1 laporan	328.186.688	1 laporan	1.221.920.438	BAKUDA	PK.PINANG
								Jumlah sosialisasi regulasi bidang keuangan Kabupaten/kota		4 kali	192.500.000	5 kali	211.750.000	6 kali	232.925.000	7 kali	256.217.500	7 kali	893.392.500	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota		7 Laporan	120000000	7 Laporan	126.000.000	7 Laporan	132.300.000	7 Laporan	138.915.000	7 Laporan	517.215.000	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	1	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota		70 orang	110000000	70 orang	121.000.000	70 orang	133.100.000	70 orang	146.410.000	70 orang	510.510.000	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah		7 dokumen	100000000	7 dokumen	110.000.000	7 dokumen	121.000.000	7 dokumen	133.100.000	7 dokumen	464.100.000	BAKUDA	PK.PINANG

		5	0	0	10		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota		7 Laporan	155100000	7 Laporan	170.610.000	7 Laporan	187.671.000	7 Laporan	206.438.100	7 Laporan	719.819.100	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota		7 Laporan	155100000	7 Laporan	170.610.000	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan	719.819.100	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		7 Laporan	155100000	7 Laporan	170610000	7 Laporan	187671000	7 Laporan	206438100	7 Laporan	719.819.100	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang		7 dokumen	135000000	7 dokumen	148.500.000	7 dokumen	163.350.000	7 dokumen	179.685.000	7 dokumen	626.535.000	BAKUDA	PK.PINANG

						Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota													
		5	0	0	10		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	7 dokum en	135000000	7 dokum en	148.500.00 0	7 dokum en	163.350.00 0	7 dokum en	179.685.00 0	7 dokum en	626.535.000	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10		Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 dokum en	135000000	7 dokum en	148.500.00 0	7 dokum en	163.350.00 0	7 dokum en	179.685.00 0	7 dokum en	626.535.000	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	0	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan	1 dokum en	135000000	1 dokum en	141.750.00 0	1 dokum en	148.837.50 0	1 dokum en	156.279.37 5	1 dokum en	581.866.875	BAKUDA	PK.PINA NG

						Triwulanan dan Semesteran	Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
		5	0	0	10	0	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 laporan	90.750.000	1 laporan	95.287.500	1 laporan	100.051.875	1 laporan	105.054.469	1 laporan	391.143.844	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	173.250.000	1 dokumen	181.912.500	1 dokumen	191.008.125	1 dokumen	711.170.625	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 dokumen	110.000.000	1 dokumen	115.500.000	1 dokumen	121.275.000	1 dokumen	127.338.750	1 dokumen	474.113.750	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 dokumen	44.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	48.510.000	1 dokumen	50.935.500	1 dokumen	189.645.500	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 dokumen	44.000.000	1 dokumen	46.200.000	1 dokumen	48.510.000	1 dokumen	50.935.500	1 dokumen	189.645.500	BAKUDA	PK.PINANG
																			BAKUDA	PK.PINANG

		5	0	0	10	0	1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		1 dokum en	82.500.000	1 dokum en	86.625.000	1 dokum en	90.956.250	1 dokum en	95.504.063	1 dokum en	355.585.313	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	0	3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		1 lapora n	71.500.000	1 lapora n	75.075.000	1 lapora n	78.828.750	1 lapora n	82.770.188	1 lapora n	308.173.938	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	0	3	Penilaian barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		1 lapora n	93.500.000	1 lapora n	98.175.000	1 lapora n	103.083.750	1 lapora n	108.237.938	1 lapora n	402.996.688	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	0	3	Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		1 lapora n	46.750.000	1 lapora n	49.087.500	1 lapora n	51.541.875	1 lapora n	54.118.969	1 lapora n	201.498.344	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	1	3	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		1 Dokum en	46.750.000	1 Dokum en	49.087.500	1 Dokum en	51.541.875	1 Dokum en	54.118.969	1 Dokum en	201.498.344	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	1	3	Rekonsiliasi dalam Rangka Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		1 lapora n	41.250.000	1 lapora n	43.312.500	1 lapora n	45.478.125	1 lapora n	47.752.031	1 lapora n	177.792.656	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	1	3	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun		1 lapora n	33.000.000	1 lapora n	34.650.000	1 lapora n	36.382.500	1 lapora n	38.201.625	1 lapora n	142.234.125	BAKUDA	PK.PINA NG
		5	0	0	10	0	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah		1 lapora n	148.500.000	1 lapora n	155.925.000	1 lapora n	163.721.250	1 lapora n	171.907.313	1 lapora n	640.053.563	BAKUDA	PK.PINA NG

		5	0	0	10	0	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 laporan	82.500.000	1 laporan	86.625.000	1 laporan	90.956.250	1 laporan	95.504.063	1 laporan	355.585.313	BAKUDA	PK.PINANG
																	-	-	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0			Program pengelolaan pendapatan daerah	pertumbuhan PAD	8,5%	935.000.000	10,0%	981.750.000	11,5%	1.030.837.500	13,0%	1.082.379.375	0	4.029.966.875	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah dokumen kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10 dokumen	465.000.000	10 dokumen	488.250.000	10 dokumen	512.662.500	10 dokumen	538.295.625	10 dokumen	2.004.208.125	BAKUDA	PK.PINANG
								Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 dokumen	395.000.000	1 dokumen	414.750.000	1 dokumen	435.487.500	1 dokumen	457.261.875	1 dokumen	1.702.499.375	BAKUDA	PK.PINANG
								Jumlah dokumen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3 dokumen	75.000.000	3 dokumen	78.750.000	3 dokumen	82.687.500	3 dokumen	86.821.875	3 dokumen	323.259.375	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	94.500.000	1 dokumen	99.225.000	1 dokumen	104.186.250	1 dokumen	387.911.250	BAKUDA	PK.PINANG
								Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	110.000.000	1 laporan	115.500.000	1 laporan	121.275.000	1 laporan	127.338.750	1 laporan	474.113.750	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	1	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki	200 Dokumen SSPD	130.000.000	250 Dokumen SSPD	136.500.000	250 Dokumen SSPD	143.325.000	250 Dokumen SSPD	150.491.250	250 Dokumen SSPD	560.316.250	BAKUDA	PK.PINANG

							Piutang Pajak.													
		5	0	0	10	1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	135.000.000	1 laporan	141.750.000	1 laporan	148.837.500	1 laporan	156.279.375	1 laporan	581.866.875	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 laporan	395.000.000	1 laporan	414.750.000	1 laporan	435.487.500	1 laporan	457.261.875	1 laporan	1.702.499.375	BAKUDA	PK.PINANG
		5	0	0	10	1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan	5 Dokumen LHP	75.000.000	5 Dokumen LHP	78.750.000	5 Dokumen LHP	82.687.500	5 Dokumen LHP	86.821.875	5 Dokumen LHP	323.259.375	BAKUDA	PK.PINANG
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan	-	BAKUDA	PK.PINANG
																		-		
							UPTB BANGKA BARAT			1.166.132.509		994.525.385		1.280.957.903		1.096.680.798		4.538.296.595	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Kabupaten Bangka Barat	80,25	1.029.532.509	80,5	851.095.385	80,75	1.130.356.403	81	938.549.223	81	3.949.533.520	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	81,25	180.760.600	81,50	189.798.630	81,75	199.288.562	82	209.252.990	82	779.100.781	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	3.000.000	12 paket	3.150.000	12 paket	3.307.500	12 paket	3.472.875	12 paket	12.930.375	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan	12 paket	92.731.600	12 paket	97.368.180	12 paket	102.236.589	12 paket	107.348.418	12 paket	399.684.787	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK

		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	14.000.000	12 paket	14.700.000	12 paket	15.435.000	12 paket	16.206.750	12 paket	60.341.750	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	10.969.000	12 paket	11.517.450	12 paket	12.093.323	12 paket	12.697.989	12 paket	47.277.761	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.800.000	12 Dokumen	5.040.000	12 Dokumen	5.292.000	12 Dokumen	5.556.600	12 Dokumen	20.688.600	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	15.000.000	12 paket	15.750.000	12 paket	16.537.500	12 paket	17.364.375	12 paket	64.651.875	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.250.000	12 Laporan	5.512.500	12 Laporan	5.788.125	12 Laporan	21.550.625	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.260.000	12 Laporan	37.023.000	12 Laporan	38.874.150	12 Laporan	40.817.858	12 Laporan	151.975.008	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 dokumen	168.787.790	36 dokumen	177.227.180	36 dokumen	186.088.538	36 dokumen	195.392.965	36 dokumen	727.496.473	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.657.500	12 laporan	6.990.375	12 laporan	7.339.894	12 laporan	7.706.888	12 laporan	28.694.657	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	162.130.290	12 laporan	170.236.805	12 laporan	178.748.645	12 laporan	187.686.077	12 laporan	698.801.816	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		X	X	0	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 unit	379.673.619	7 unit	188.743.550	11 unit	434.765.102	9 unit	218.178.357	9 unit	1.221.360.628	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK

		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	44.906.400	1 paket	47.151.720	1 paket	49.509.306	1 paket	39.409.771	1 paket	180.977.197	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	135.767.219	6 unit	141.591.830	8 unit	170.255.796	8 unit	178.768.586	8 unit	626.383.431	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	199.000.000			2 unit	215.000.000			-	414.000.000	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	40 unit	300.310.500	40 unit	295.326.025	40 unit	310.214.201	40 unit	315.724.911	40 unit	1.221.575.638	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	88.095.000	4 unit	92.499.750	4 unit	97.124.738	4 unit	101.980.974	4 unit	379.700.462	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 unit	1.250.000	1 unit	1.312.500	1 unit	1.500.000	1 unit	1.575.000	1 unit	5.637.500	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	30.565.500	33 unit	32.093.775	33 unit	33.698.464	33 unit	35.383.387	33 unit	131.741.126	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	180.400.000	1 unit	169.420.000	1 unit	177.891.000	1 unit	176.785.550	1 unit	704.496.550	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
																-	-		UPTB BANGKA BARAT	MENTO K
		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Barat	9,71%	136.600.000	10,68%	143.430.000	11,75%	150.601.500	12,92%	158.131.575	0	588.763.075	UPTB BANGKA BARAT	MENTO K

		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	31.000.000	3 dokumen	32.550.000	3 dokumen	34.177.500	3 dokumen	35.886.375	3 dokumen	133.613.875	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
								Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Barat	100%	105.600.000	100%	110.880.000	100%	116.424.000	100%	122.245.200	1	455.149.200	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	18 laporan	11.000.000	19 laporan	11.550.000	20 laporan	12.127.500	20 laporan	12.733.875	20 laporan	47.411.375	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.000.000	1 laporan	22.050.000	1 laporan	23.152.500	1 laporan	86.202.500	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	40000 Dokumen Ketetapan	105.600.000	40000 Dokumen Ketetapan	110.880.000	40000 Dokumen Ketetapan	116.424.000	40000 Dokumen Ketetapan	122.245.200	40000 Dokumen Ketetapan	455.149.200	UPTB BANGKA BARAT	MENTOK
							UPTB PANGKALPINANG			1.694.000.000		1.568.950.000		1.847.622.500		1.940.203.625	-	7.050.776.125	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Pangkalpinang	81	1.454.000.000	82	1.316.950.000	83	1.583.022.500	84	1.662.373.625	84	6.016.346.125	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	295.500.000	77,5	310.275.000	78	325.788.750	78,5	342.078.188	79	1.273.641.938	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG

		X	X	0	10	0	1	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.500.000	4 paket	13.125.000	4 paket	13.781.250	4 paket	14.470.313	4 paket	53.876.563	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	175.000.000	4 paket	183.750.000	4 paket	192.937.500	4 paket	202.584.375	4 paket	754.271.875	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	47.500.000	4 paket	49.875.000	4 paket	52.368.750	4 paket	54.987.188	4 paket	204.730.938	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	22.500.000	4 paket	23.625.000	4 paket	24.806.250	4 paket	26.046.563	4 paket	96.977.813	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5.500.000	15 Dokumen	5.775.000	15 Dokumen	6.063.750	15 Dokumen	6.366.938	15 Dokumen	23.705.688	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	7.500.000	12 Laporan	7.875.000	12 Laporan	8.268.750	12 Laporan	8.682.188	12 Laporan	32.325.938	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	25.000.000	30 Laporan	26.250.000	30 Laporan	27.562.500	30 Laporan	28.940.625	30 Laporan	107.753.125	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 dokumen	243.500.000	24 dokumen	255.675.000	24 dokumen	268.458.750	24 dokumen	281.881.688	24 dokumen	1.049.515.438	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.500.000	12 laporan	3.675.000	12 laporan	3.858.750	12 laporan	4.051.688	12 laporan	15.085.438	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG
		X	X	0	10	0	1	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	240.000.000	12 laporan	252.000.000	12 laporan	264.600.000	12 laporan	277.830.000	12 laporan	1.034.430.000	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINA NG

		X	X	0	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 unit	475.000.000	9 unit	288.750.000	11 unit	503.187.500	11 unit	528.346.875	11 unit	1.795.284.375	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	110.000.000	1 paket	115.500.000	1 paket	121.275.000	1 paket	127.338.750	1 paket	474.113.750	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	165.000.000	12 unit	173.250.000	15 unit	181.912.500	18 unit	191.008.125	18 unit	711.170.625	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	200.000.000			1 unit	200.000.000		210.000.000	-	610.000.000	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	60 unit	440.000.000	60 unit	462.250.000	65 unit	485.587.500	65 unit	510.066.875	65 unit	1.897.904.375	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	72.500.000	4 unit	76.125.000	4 unit	79.931.250	4 unit	83.927.813	4 unit	312.484.063	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	-	23.000.000	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	82.500.000	55 unit	86.625.000	60 unit	90.956.250	60 unit	95.504.063	60 unit	355.585.313	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	280.000.000	1 unit	294.000.000	1 unit	308.700.000	1 unit	324.135.000	1 unit	1.206.835.000	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG
																-	-	UPTB PANGKALPI NANG	PK.PINANG	

		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kota Pangkalpinang	5,36%	240.000.000	5,66%	252.000.000	5,95%	264.600.000	6,24%	277.830.000	0	1.034.430.000	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	40.000.000	3 dokumen	42.000.000	3 dokumen	44.100.000	3 dokumen	46.305.000	3 dokumen	172.405.000	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
								Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	220.500.000	100%	231.525.000	100%	862.025.000	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	25.000.000	1 laporan	26.250.000	1 laporan	27.562.500	1 laporan	28.940.625	1 laporan	107.753.125	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.750.000	1 laporan	16.537.500	1 laporan	17.364.375	1 laporan	64.651.875	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	94.100 Dokumen Ketetapan	200.000.000	95.841 Dokumen Ketetapan	210.000.000	97.614 Dokumen Ketetapan	220.500.000	99.420 Dokumen Ketetapan	231.525.000	99.420 Dokumen Ketetapan	862.025.000	UPTB PANGKALPINANG	PK.PINANG
																	-	-		
-	-						UPTB BELITUNG TIMUR			1.506.000.000		1.425.290.336		1.711.304.853		1.570.870.096	-	6.213.465.285	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Belitung Timur	79	1.161.000.000	80	1.063.040.336	81	1.330.942.353	82	1.171.489.471	82	4.726.472.160	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat	Indeks kepuasan	77	397.000.000	77,5	404.250.000	78	424.462.500	78,5	445.685.620	79	1.671.398.100	UPTB BELITUNG	MANGGAR

						Daerah	pelayanan umum		0		0		0	5		25	TIMUR			
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	4 paket	3.150.000	4 paket	3.307.500	4 paket	3.472.875	4 paket	24.930.375	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	205.000.000	4 paket	215.250.000	4 paket	226.012.500	4 paket	237.313.125	4 paket	883.575.625	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	70.000.000	4 paket	73.500.000	4 paket	77.175.000	4 paket	81.033.750	4 paket	301.708.750	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	13.500.000	4 paket	14.175.000	4 paket	14.883.750	4 paket	15.627.938	4 paket	58.186.688	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12.000.000	15 Dokumen	12.600.000	15 Dokumen	13.230.000	15 Dokumen	13.891.500	15 Dokumen	51.721.500	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah Laporan Kunjungan Tamu	12 Laporan	11.500.000	12 Laporan	12.075.000	12 Laporan	12.678.750	12 Laporan	13.312.688	12 Laporan	49.566.438	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	70.000.000	30 Laporan	73.500.000	30 Laporan	77.175.000	30 Laporan	81.033.750	30 Laporan	301.708.750	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 dokumen	130.000.000	24 dokumen	196.486.805	24 dokumen	206.311.145	24 dokumen	216.626.702	24 dokumen	749.424.651	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	25.000.000	12 laporan	26.250.000	12 laporan	27.562.500	12 laporan	28.940.625	12 laporan	107.753.125	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan	105.000.000	12 laporan	170.236.805	12 laporan	178.748.645	12 laporan	187.686.077	12 laporan	641.671.526	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR

							yang Disediakan													
		X	X	0	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 unit	349.000.000	9 unit	163.303.532	11 unit	386.468.708	11 unit	180.042.144	11 unit	1.078.814.384	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	50.000.000	1 paket	52.500.000	1 paket	55.125.000	1 paket	57.881.250	1 paket	215.506.250	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	100.000.000	6 unit	110.803.532	8 unit	116.343.708	8 unit	122.160.894	8 unit	449.308.134	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	199.000.000			1 unit	215.000.000			1 unit	414.000.000	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara	62 unit	285.000.000	62 unit	299.000.000	67 unit	313.700.000	67 unit	329.135.000	67 unit	1.226.835.000	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	120.000.000	4 unit	126.000.000	4 unit	132.300.000	4 unit	138.915.000	4 unit	517.215.000	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	20.000.000	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	35.000.000	55 unit	36.750.000	60 unit	38.587.500	60 unit	40.516.875	60 unit	150.854.375	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	125.000.000	1 unit	131.250.000	1 unit	137.812.500	1 unit	144.703.125	1 unit	538.765.625	UPTB BELITUNG TIMUR	MANGGAR

		X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Bangka	81,5	1.641.500.000	82,5	1.347.075.000	83,5	1.814.841.250	84,5	1.906.208.313	85	6.709.624.563	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	447.000.000	77,5	469.350.000	78	492.817.500	78,5	517.458.375	79	1.926.625.875	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	14.000.000	4 paket	14.700.000	4 paket	15.435.000	4 paket	16.206.750	4 paket	60.341.750	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	210.000.000	4 paket	220.500.000	4 paket	231.525.000	4 paket	243.101.250	4 paket	905.126.250	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	95.000.000	4 paket	99.750.000	4 paket	104.737.500	4 paket	109.974.375	4 paket	409.461.875	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	60.000.000	4 paket	63.000.000	4 paket	66.150.000	4 paket	69.457.500	4 paket	258.607.500	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5.500.000	15 Dokumen	5.775.000	15 Dokumen	6.063.750	15 Dokumen	6.366.938	15 Dokumen	23.705.688	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.500.000	12 Laporan	28.875.000	12 Laporan	30.318.750	12 Laporan	31.834.688	12 Laporan	118.528.438	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	35.000.000	30 Laporan	36.750.000	30 Laporan	38.587.500	30 Laporan	40.516.875	30 Laporan	150.854.375	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 dokumen	259.500.000	36 dokumen	263.225.000	36 dokumen	276.573.750	36 dokumen	290.827.438	36 dokumen	1.090.126.188	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 laporan	4.500.000	12 laporan	4.725.000	12 laporan	4.961.250	12 laporan	5.209.313	12 laporan	19.395.563	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT

							Menyurat													
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	245.000.000	12 laporan	257.250.000	12 laporan	270.112.500	12 laporan	283.618.125	12 laporan	1.055.980.625	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	10.000.000	12 laporan	1.250.000	12 laporan	1.500.000	12 laporan	2.000.000	12 laporan	14.750.000	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	9 unit	650.000.000	7 unit	315.000.000	11 unit	730.750.000	9 unit	767.287.500	9 unit	2.463.037.500	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	75.000.000	1 paket	78.750.000	1 paket	82.687.500	1 paket	86.821.875	1 paket	323.259.375	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	225.000.000	6 unit	236.250.000	8 unit	248.062.500	8 unit	260.465.625	8 unit	969.778.125	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	350.000.000			2 unit	400.000.000		420.000.000	-	1.170.000.000	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	60 unit	285.000.000	60 unit	299.500.000	61 unit	314.700.000	61 unit	330.635.000	61 unit	1.229.835.000	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	45.000.000	4 unit	47.250.000	4 unit	49.612.500	4 unit	52.093.125	4 unit	193.955.625	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000	-	23.000.000	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT

		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	110.000.000	55 unit	115.500.000	60 unit	121.275.000	60 unit	127.338.750	60 unit	474.113.750	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	125.000.000	1 unit	131.250.000	1 unit	137.812.500	1 unit	144.703.125	1 unit	538.765.625	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
																	-	-	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilaah Kabupaten Bangka	9,57%	510.000.000	10,52 %	535.500.000	11,58 %	562.275.000	12,73 %	590.388.750	0	2.198.163.750	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	85.000.000	3 dokumen	89.250.000	3 dokumen	93.712.500	3 dokumen	98.398.125	3 dokumen	366.360.625	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
							Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka		100%	425.000.000	100%	446.250.000	100%	468.562.500	100%	491.990.625	1	1.831.803.125	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	60.000.000	1 laporan	63.000.000	1 laporan	66.150.000	1 laporan	69.457.500	1 laporan	258.607.500	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	25.000.000	1 laporan	26.250.000	1 laporan	27.562.500	1 laporan	28.940.625	1 laporan	107.753.125	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT

		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	90.100 Dokumen Ketetapan	425.000.000	91.767 Dokumen Ketetapan	446.250.000	93.465 Dokumen Ketetapan	468.562.500	95.194 Dokumen Ketetapan	491.990.625	95.194 Dokumen Ketetapan	1.831.803.125	UPTB BANGKA	SUNGAI LIAT
-	-						UPTB BANGKA TENGAH			2.525.450.000		1.662.205.000		2.753.425.500		2.208.768.050	-	9.149.848.550	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Bangka Tengah	79	2.294.450.000	80	1.408.105.000	81	2.473.915.500	82	1.901.307.050	82	8.077.777.550	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	259.050.000	77,5	284.955.000	78	313.450.500	78,5	344.795.550	79	1.202.251.050	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.050.000	4 paket	6.655.000	4 paket	7.320.500	4 paket	8.052.550	4 paket	28.078.050	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	101.750.000	4 paket	111.925.000	4 paket	123.117.500	4 paket	135.429.250	4 paket	472.221.750	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	41.250.000	4 paket	45.375.000	4 paket	49.912.500	4 paket	54.903.750	4 paket	191.441.250	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	13.750.000	4 paket	15.125.000	4 paket	16.637.500	4 paket	18.301.250	4 paket	63.813.750	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	5.500.000	15 Dokumen	6.050.000	15 Dokumen	6.655.000	15 Dokumen	7.320.500	15 Dokumen	25.525.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.250.000	12 Laporan	9.075.000	12 Laporan	9.982.500	12 Laporan	10.980.750	12 Laporan	38.288.250	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	82.500.000	30 Laporan	90.750.000	30 Laporan	99.825.000	30 Laporan	109.807.500	30 Laporan	382.882.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA

		X	X	0	10		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 dokumen	137.500.000	24 dokumen	151.250.000	24 dokumen	166.375.000	24 dokumen	183.012.500	24 dokumen	638.137.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.500.000	12 laporan	6.050.000	12 laporan	6.655.000	12 laporan	7.320.500	12 laporan	25.525.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	132.000.000	12 laporan	145.200.000	12 laporan	159.720.000	12 laporan	175.692.000	12 laporan	612.612.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 unit	1.523.900.000	9 unit	560.500.000	10 unit	1.541.550.000	11 unit	875.705.000	11 unit	4.501.655.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	55.000.000	1 paket	60.500.000	1 paket	66.550.000	1 paket	73.205.000	1 paket	255.255.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	1.250.000.000	6 unit	250.000.000	8 unit	275.000.000	8 unit	302.500.000	8 unit	2.077.500.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 paket	218.900.000	2 paket	250.000.000	1 paket	1.200.000.000	2 paket	500.000.000	2 paket	2.168.900.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	62 unit	374.000.000	62 unit	411.400.000	67 unit	452.540.000	67 unit	497.794.000	67 unit	1.735.734.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	90.750.000	4 unit	99.825.000	4 unit	109.807.500	4 unit	120.788.250	4 unit	421.170.750	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5.500.000	2 unit	6.050.000	2 unit	6.655.000	2 unit	7.320.500	2 unit	25.525.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA

		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	74.250.000	55 unit	81.675.000	60 unit	89.842.500	60 unit	98.826.750	60 unit	344.594.250	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	203.500.000	1 unit	223.850.000	1 unit	246.235.000	1 unit	270.858.500	1 unit	944.443.500	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
																-	-	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA	
		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilaah Kabupaten Bangka Tengah	9,57%	231.000.000	10,52%	254.100.000	11,58%	279.510.000	12,73%	307.461.000	0	1.072.071.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	77.000.000	3 dokumen	84.700.000	3 dokumen	93.170.000	3 dokumen	102.487.000	3 dokumen	357.357.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
							Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah		100%	154.000.000	100%	169.400.000	100%	186.340.000	100%	204.974.000	1	714.714.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	22.000.000	1 laporan	24.200.000	1 laporan	26.620.000	1 laporan	29.282.000	1 laporan	102.102.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	55.000.000	1 laporan	60.500.000	1 laporan	66.550.000	1 laporan	73.205.000	1 laporan	255.255.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA

		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	50000 Dokumen Ketetapan	154.000.000	50000 Dokumen Ketetapan	169.400.000	50000 Dokumen Ketetapan	186.340.000	50000 Dokumen Ketetapan	204.974.000	50000 Dokumen Ketetapan	714.714.000	UPTB BANGKA TENGAH	KOBA
-	-						UPTB BELITUNG			1.955.800.000		1.733.975.000		2.020.898.750		2.122.143.688	-	7.832.817.438	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah UPTB Belitung	80,5	1.725.800.000	81	1.472.475.000	81,5	1.746.323.750	82	1.833.839.938	82	6.778.438.688	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	497.500.000	77,5	522.375.000	78	548.493.750	78,5	575.918.438	79	2.144.287.188	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	15.000.000	4 paket	15.750.000	4 paket	16.537.500	4 paket	17.364.375	4 paket	64.651.875	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	185.000.000	4 paket	194.250.000	4 paket	203.962.500	4 paket	214.160.625	4 paket	797.373.125	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	60.000.000	4 paket	63.000.000	4 paket	66.150.000	4 paket	69.457.500	4 paket	258.607.500	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	27.500.000	4 paket	28.875.000	4 paket	30.318.750	4 paket	31.834.688	4 paket	118.528.438	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	15 Dokumen	12.500.000	15 Dokumen	13.125.000	15 Dokumen	13.781.250	15 Dokumen	14.470.313	15 Dokumen	53.876.563	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN

		X	X	01	106	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	17.500.000	12 Laporan	18.375.000	12 Laporan	19.293.750	12 Laporan	20.258.438	12 Laporan	75.427.188	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan	180.000.000	30 Laporan	189.000.000	30 Laporan	198.450.000	30 Laporan	208.372.500	30 Laporan	775.822.500	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	108		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		36 dokumen	220.000.000	36 dokumen	231.000.000	36 dokumen	242.550.000	36 dokumen	254.677.500	36 dokumen	948.227.500	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	18.000.000	12 laporan	18.900.000	12 laporan	19.845.000	12 laporan	20.837.250	12 laporan	77.582.250	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTB Wilayah Kabupaten Belitung)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	180.000.000	12 laporan	189.000.000	12 laporan	198.450.000	12 laporan	208.372.500	12 laporan	775.822.500	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	107		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	22.000.000	12 laporan	23.100.000	12 laporan	24.255.000	12 laporan	25.467.750	12 laporan	94.822.750	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	107	05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan		8 unit	576.300.000	7 unit	260.000.000	10 unit	473.000.000	9 unit	496.650.000	9 unit	1.805.950.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	01	107	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 paket	48.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	52.500.000	1 paket	55.125.000	1 paket	205.625.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN

		X	X	0	10	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	200.000.000	6 unit	210.000.000	8 unit	220.500.000	8 unit	231.525.000	8 unit	862.025.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	328.300.000			1 unit	200.000.000		210.000.000	-	738.300.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	62 unit	432.000.000	61 unit	459.100.000	67 unit	482.280.000	66 unit	506.594.000	66 unit	1.879.974.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	97.000.000	4 unit	101.850.000	4 unit	106.942.500	4 unit	112.289.625	4 unit	418.082.125	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	-	2 unit	5.500.000	2 unit	6.000.000	2 unit	6.500.000	2 unit	18.000.000	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	60.000.000	55 unit	63.000.000	60 unit	66.150.000	60 unit	69.457.500	60 unit	258.607.500	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	275.000.000		288.750.000	1 unit	303.187.500		318.346.875	-	1.185.284.375	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN
																-	-	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN	
		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Belitung	11,26 %	230.000.000	12,39 %	261.500.000	13,63 %	274.575.000	14,99 %	288.303.750	0	1.054.378.750	UPTB BELITUNG	TANJUNGPANDAN

		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Belitung (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	35.000.000	3 dokumen	36.750.000	3 dokumen	38.587.500	3 dokumen	40.516.875	3 dokumen	150.854.375	UPTB BELITUNG	TANJUN G PANDA N
								Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Belitung	100%	195.000.000	100%	224.750.000	100%	235.987.500	100%	247.786.875	1	903.524.375	UPTB BELITUNG	TANJUN G PANDA N
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	35.000.000	1 laporan	36.750.000	1 laporan	38.587.500	1 laporan	40.516.875	1 laporan	150.854.375	UPTB BELITUNG	TANJUN G PANDA N
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	21.000.000	1 laporan	22.050.000	1 laporan	63.050.000	UPTB BELITUNG	TANJUN G PANDA N
		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	76.853 Dokumen Ketetapan	195.000.000	78.275 Dokumen Ketetapan	204.750.000	79.723 Dokumen Ketetapan	214.987.500	81.198 Dokumen Ketetapan	225.736.875	81.198 Dokumen Ketetapan	840.474.375	UPTB BELITUNG	TANJUN G PANDA N
																		-	-	
-	-						UPTB BANGKA SELATAN			1.469.000.000		1.375.367.905		1.643.886.300		1.725.830.615	-	6.214.084.819	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai survey kepuasan internal Perangkat Daerah upb Bangka Selatan	79,5	1.098.500.000	81	986.342.905	82	1.235.410.050	82,5	1.296.930.552	83	4.617.183.506	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan umum	77	255.000.000	77,5	269.306.100	78	282.771.405	78,5	296.909.975	79	1.103.987.480	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I

		X	X	0	10	0	1	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	6.000.000	4 paket	6.300.000	4 paket	6.615.000	4 paket	6.945.750	4 paket	25.860.750	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	110.000.000	4 paket	115.500.000	4 paket	121.275.000	4 paket	127.338.750	4 paket	474.113.750	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	32.500.000	4 paket	34.125.000	4 paket	35.831.250	4 paket	37.622.813	4 paket	140.079.063	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.500.000	4 paket	8.066.100	4 paket	8.469.405	4 paket	8.892.875	4 paket	32.928.380	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15 Dokumen	3.500.000	15 Dokumen	5.040.000	15 Dokumen	5.292.000	15 Dokumen	5.556.600	15 Dokumen	19.388.600	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	8	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.500.000	12 Laporan	28.875.000	12 Laporan	30.318.750	12 Laporan	31.834.688	12 Laporan	118.528.438	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	68.000.000	30 Laporan	71.400.000	30 Laporan	74.970.000	30 Laporan	78.718.500	30 Laporan	293.088.500	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10		1	0	8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	24 dokumen	136.000.000	24 dokumen	176.536.805	24 dokumen	185.363.645	24 dokumen	194.631.827	24 dokumen	692.532.276	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	6.000.000	12 laporan	6.300.000	12 laporan	6.615.000	12 laporan	6.945.750	12 laporan	25.860.750	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		X	X	0	10	0	1	0	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	130.000.000	12 laporan	170.236.805	12 laporan	178.748.645	12 laporan	187.686.077	12 laporan	666.671.526	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI

		X	X	0	10		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	8 unit	377.500.000	7 unit	194.250.000	10 unit	403.962.500	9 unit	424.160.625	9 unit	1.399.873.125	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket	50.000.000	1 paket	52.500.000	1 paket	55.125.000	1 paket	57.881.250	1 paket	215.506.250	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	135.000.000	6 unit	141.750.000	8 unit	148.837.500	8 unit	156.279.375	8 unit	581.866.875	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	192.500.000			1 unit	200.000.000	1 unit	210.000.000	1 unit	602.500.000	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	62 unit	330.000.000	62 unit	346.250.000	67 unit	363.312.500	67 unit	381.228.125	67 unit	1.420.790.625	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 unit	120.000.000	4 unit	126.000.000	4 unit	132.300.000	4 unit	138.915.000	4 unit	517.215.000	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	20.000.000	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 unit	55.000.000	55 unit	57.750.000	60 unit	60.637.500	60 unit	63.669.375	60 unit	237.056.875	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
		X	X	0	10	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	150.000.000	1 unit	157.500.000	1 unit	165.375.000	1 unit	173.643.750	1 unit	646.518.750	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I
																	-	-	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOAL I

		5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	pertumbuhan Pajak Daerah pada UPTB Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	11,26 %	370.500.000	12,39 %	389.025.000	13,63 %	408.476.250	14,99 %	428.900.063	0	1.596.901.313	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		5	0	0	10		Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Data Pajak Daerah yang menjadi kewenangan UPTB Kab Bangka Selatan (Data wajib pajak terealisasi, tertunggak, data baru)	3 dokumen	70.500.000	3 dokumen	74.025.000	3 dokumen	77.726.250	3 dokumen	81.612.563	3 dokumen	303.863.813	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
								Persentase realisasi target pendapatan pajak daerah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Selatan	100%	300.000.000	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.500	1	1.293.037.500	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		5	0	0	10	0	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 laporan	43.000.000	1 laporan	45.150.000	1 laporan	47.407.500	1 laporan	49.777.875	1 laporan	185.335.375	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		5	0	0	10	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 laporan	27.500.000	1 laporan	28.875.000	1 laporan	30.318.750	1 laporan	31.834.688	1 laporan	118.528.438	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
		5	0	0	10	0	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	41.691 Dokumen Ketetapan	300.000.000	42.462 Dokumen Ketetapan	315.000.000	43.248 Dokumen Ketetapan	330.750.000	44.048 Dokumen Ketetapan	347.287.500	44.048 Dokumen Ketetapan	1.293.037.500	UPTB BANGKA SELATAN	TOBOALI
										580.483.956.897		560.211.528.797		589.931.927.986		619.019.728.785	-	2.349.647.142.466		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai wujud dukungan pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih masa 2023-2026.

Indikator Kinerja Perangkat ini merupakan perumusan target pencapaian sasaran strategis yang disarikan dari evaluasi Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa 2023-2026 serta keinginan yang ingin dicapai dalam kurun 4 (empat) tahun ke depan dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang, kekuatan dan kelemahan, serta peluang dan ancaman yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026.

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026, Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendukung Misi 3 dari RPJPD dimaksud sebagaimana telah dijabarkan pada Bab III di atas.

Keterkaitan dukungan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergambar dalam tabel berikut :

TABEL T-C.28
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGTAHUN 2023-2026
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2023-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PRIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN (2021)	TH .1 (2023)	TH. 2 (2024)	TH. 3 (2025)	TH. 4 (2026)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						
	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kep Bangka Belitung	66,08	68,25	69	69,75	70,5	71
	Meningkatkan tata kelola internal Perangkat Daerah						
1	Nilai RB Perangkat Daerah	22,22	30	35	40	45	45
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mencerminkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang mandiri dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan						
2	Persentase kesesuaian dokumen anggaran terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai rata-rata IPKD Kabupaten/Kota		75	77	79	81	81
4	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja APBD	83,46%	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%	94,0%
5	Opini BPK atas pemeriksaan LKPD (WTP = 3, WDP = 2, Disclaimer = 1)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah	33,13%	33,29%	33,45%	33,51%	33,67%	33,67%

BAB VIII

PENUTUP

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) maka Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan kerja 4 (empat) tahun.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

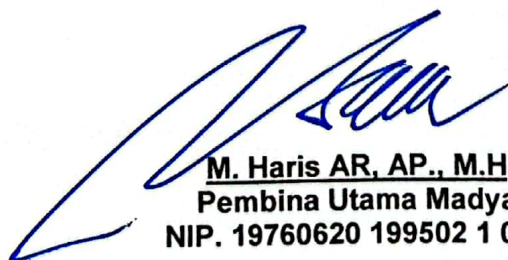
Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang. Prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan Rencana Strategis ini.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini prinsip efektif, efisiensi, akuntabel, transparan akan diutamakan sesuai dengan pagu indikatif yang tersedia. Apabila pagu indikatif yang tersedia tidak cukup untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini, maka akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun sebagai dasar perencanaan Program dan Kegiatan Prioritas dalam 4 (empat) tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, Juni 2022

KEPALA BADAN,



M. Haris AR, AP., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19760620 199502 1 001

**SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEUANGAN DAERAH

NO	SISTEMATIKA	ADA	TIDAK ADA	ALASAN	TINDAK LANJUT
1	BAB I PENDAHULUAN	V			
	1.1 LATAR BELAKANG	V			
	1.2 LANDASAN HUKUM	V			
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	V			
	1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN	V			
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	V			
	2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	V			
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	V			
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	V			
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	V			
3	BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	V			
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	V			
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	V			
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	V			
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	V			
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	V			
4	BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	V			
	4.1. Tujuan dan Sasaran Menengah Perangkat Daerah	V			
5	Bab V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V			
6	Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	V			
7	BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	V			
8	BAB VIII PENUTUP	V			
	Berisikan uraian penutup	V			

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

PIMPINAN DESK


M. HARIS AR, AP., M.H
NIP. 19760620 199502 1 001

KUSUMAWATI, S.E., M.A., M.Ec.Dev
NIP. 19810219 200501 2 008

Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026

105

Formulir VII.D.8
Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2023-2026

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	2	3
1	Perumusan visi dan misi SKPD provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	
2	Perumusan strategi dan kebijakan SKPD provinsi berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	
3	Perumusan rencana program, kegiatan SKPD provinsi berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	
4	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	
5	Perumusan indikator kinerja SKPD provinsi berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	
6	Pentahapan pelaksanaan program SKPD provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	

Pangkalpinang, Juni 2022

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

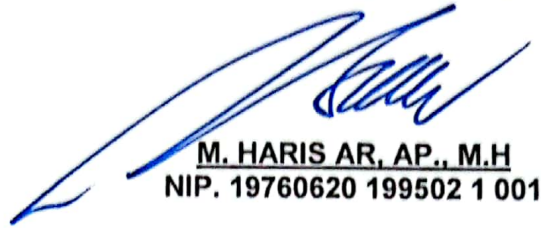
H. FERY INSANI, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700620 199903 1 009

Formulir E.27
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah :

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi	
		Kesesuaian	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	√	
2	Penyiapan data dan informasi	√	
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√	
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	√	
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	√	
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	√	
7	Perumusan isu-isu strategis	√	
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi	√	
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√	
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√	
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	√	
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	√	
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	√	
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√	
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	√	
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	√	
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	√	
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	√	

19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	V	
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disyahkan	V	

Pangkalpinang, Juni 2022
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



M. HARIS AR, AP., M.H
NIP. 19760620 199502 1 001